ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA (SIMASGARA) PADA BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANAGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN MANDAILING NATAL

TESIS

OLEH

HUSNI TAMRIN
NPM. 231801064

PROGRAM STUDIMAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
---
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 21/8/25

Access From (repository.uma.ac.id)21/8/25

ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA(SIMASGARA) PADA BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANAGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN MANDAILING NATAL

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik
pada Pascasarjana Universitas Medan Area

OLEH

HUSNI TAMRIN
231801064

PROGRAM STUDIMAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
---
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 21/8/25

Access From (repository.uma.ac.id)21/8/25

UNIVERSITAS MEDAN AREA
PASCASARJANA
MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : **Analisis Implementasi Sistem Informasi Manajemen Aparatur Sipil Negara (SIMASGARA) Pada Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mandailing Natal**

Nama : **Husni Tamrin**

NPM : **231801064**

MENYETUJUI

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Syafruddin Ritonga, MAP	**Dr. Walid Musthafa S., S.Sos, M.IP**

Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik	Direktur
Dr. Yanhar Jamaluddin, M.AP	**Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS**

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 21/8/25
Access From (repository.uma.ac.id)21/8/25

Telah diuji Pada 22 April 2025

Nama : Husni Tamrin

NPM : 231801064

Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Maksum Syahri Lubis, S.STP, MAP

Sekretaris : Dr. Chairika Nasution, S.AP, MAP

Pembimbing I : Dr. Syafruddin Ritonga, MAP

Pembimbing II : Dr. Walid Musthafa S., S.Sos, M.IP

Penguji Tamu : Dr. Adam, MAP

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 21/8/25
Access From (repository.uma.ac.id)21/8/25

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, 22 April 2025

Husni Tamrin
231801064

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 21/8/25
Access From (repository.uma.ac.id)21/8/25

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Husni Tamrin
NPM : 231801064
Program Studi : Adminisytrasi Publik
Fakultas : Pascasarjana
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif *(Non-exclusive Royalty-Free Right)* atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Analisis Implementasi Sistem Informasi Manajemen Aparatur Sipil Negara (SIMASGARA) Pada Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mandailing Natal

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data *(database)*, merawat dan mempublikasikan tugas akhir/ skripsi/tesis saya.
Demikian penyampaian ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada Tanggal : 22 April 2025
Yang Menyatakan

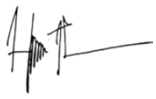

(Husni Tamrin)

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 21/8/25
Access From (repository.uma.ac.id)21/8/25

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan karunianya, sehingga tesis yang berjudul

"Analisis Implementasi Sistem Informasi Manajemen Aparatur Sipil Negara (SIMASGARA) Pada Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mandailing Natal." ini dapat diselesaikan.

Tesis disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Medan Area. Tentunya tesis ini tak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan dari beberapa pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini, khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc, selaku rektor Universitas Medan Area;
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti K.MS, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area;
3. Bapak Dr. Yanhar Jamaluddin, MAP. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik;
4. Bapak Dr. Syafruddin Ritonga, MAP selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini;

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 21/8/25
Access From (repository.uma.ac.id)21/8/25

5. Bapak Dr. Walid Musthafa S., S.Sos, M.IP selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini;
6. Ibu Dr. Chairika Nasution, S.AP, MAP selaku Sekretaris yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini;
7. Bapak Drs. Lismulyadi Nasution, MM. Selaku Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mandailin Natal yang telah bersedia memberikan izin penelitian dan memberikan data yang dibutuhkan dalam penyeselesaian tesis ini.

Penulis menyadari, tesis ini belum sempurna, masih banyak kekurangan dan keterbatasan yang perlu diperbaiki. Untuk itu, segenap kritis, saran, dan masukan yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga bermanfaat bagi semua.

Medan, April 2025

Husni Tamrin

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 21/8/25
Access From (repository.uma.ac.id)21/8/25

ABSTRAK

ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA(SIMASGARA) PADA BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANAGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN MANDAILING NATAL

Nama : **Husni Tamrin**
NPM : **231801064**
Program Studi : **Administrasi Publik**
Pembimbing I : **Dr. Syafruddin Ritonga, MAP**
Pembimbing II : **Dr. Walid Musthafa S., S.Sos, M.IP**

Penelitian ini dilatar belakangi dengan pemerintah yang dituntut untuk melakukan reformasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya, termasuk dalam pelayanan kepada publik, yang berbasis teknologi informasi maka sistem informasi manajemen Aparatur Sipil Negara (SIMASGARA) merupakan sebuah contoh Sebagai implementasi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan yang tujuannya agar Badan Kepegawaian Daerah dapat memiliki kemampuan mengelola serta memberikan berbagai informasi tentang pegawai aparatur sipil negara yang mencakup perencanaan, pengembangan kualitas sumber daya pegawai aparatur sipil negara dan administrasi kepegawaian, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan dan pemeliharaan informasi kepegawaian, serta mendukung perumusan kebijaksanaan kesejahteraan pegawai aparatur sipil negara . Tujuan penelitian ini untuk Untuk menganalisis Implementasi Sistem Informasi Manajemen Aparatur Sipil Negara (SIMASGARA) Pada Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mandailin Natal. serta Untuk menganalisis faktor penghambat Implementasi Sistem Informasi Manajemen Aparatur Sipil Negara (SIMASGARA) Pada Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mandailin Natal. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dengan menggunakan indicator menurut teori George C. Edwards III dimana adanya komunikasi yang disampaikan secara jelas dan tepat dapat mempermudah proses kegiatan implementasi, terciptanya sumber daya yang cukup dan terarahnya disposisi serta terstrukturnya birokrasi yang memiliki hubungan baik potensial dalam menjalankan kebijakan tersebut.

Kata Kunci : Implementasi, Informasi, Simasgara

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 21/8/25
Access From (repository.uma.ac.id)21/8/25

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF THE STATE CIVIL APPARATUS MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (SIMASGARA) AT THE HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT AGENCY OF MANDAILING NATAL REGENCY

Name	***: Husni Tamrin***
NPM	***: 231801064***
Study Program	***: Administrasi Publik***
Advisor I	***: Dr. Syafruddin Ritonga, MAP***
Advisor II	***: Dr. Walid Musthafa S., S.Sos, M.IP***

This research is motivated by the government being required to carry out reforms in the implementation of its governance, including in public services, which are based on information technology, so the State Civil Apparatus Management Information System (SIMASGARA) is an example of the implementation of the use of information and communication technology in government, the aim of which is for the Regional Civil Service Agency to have the ability to manage and provide various information about state civil servants which includes planning, development of the quality of state civil servant resources and personnel administration, supervision and control of the implementation and maintenance of personnel information, and support the formulation of state civil servant welfare policies. The purpose of this study is to analyze the Implementation of the State Civil Apparatus Management Information System (SIMASGARA) at the Human Resources Development Personnel Agency of Mandailin Natal Regency. and to analyze the inhibiting factors for the Implementation of the State Civil Apparatus Management Information System (SIMASGARA) at the Human Resources Development Personnel Agency of Mandailin Natal Regency. The results of this study indicate that by using indicators according to the theory of George C. Edwards III where communication is delivered clearly and precisely can facilitate the process of implementation activities, the creation of sufficient resources and the direction of the disposition and structure of the bureaucracy that has good potential relationships in implementing the policy.

Keywords : Implementation, Information, Simasgara

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 21/8/25

Access From (repository.uma.ac.id)21/8/25

DAFTAR ISI

ABSTRAK ..... **i**
ABSTRACT ..... **ii**
DAFTAR ISI ..... **iii**
DAFTAR GAMBAR ..... **v**
DAFTAR TABEL ..... **vi**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **vii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 4
1.3 Tujuan Penelitian 5
1.4 Manfaat Penelitian 5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **6**
2.1 Teori Implementasi 6
2.2 Teori Sistem Informasi Manajemen 15
2.3 Teknologi Informasi Dan Komunikasi 21
2.4 E-Goverment 24
2.5 Penelitian Terdahulu 44
2.6 Kerangka Berfikir 47
BAB III METODOLOGI PENELITIAN **49**
3.1 Jenis Penelitian 49
3.2 Tempat Dan Waktu Penelitian 50
3.3 Sumber Data 51
3.4 Informan Penelitian 52
3.5 Teknik Pengumpulan Data 53
3.6 Teknik Analisis Data 54
3.7 Definisi Konsep Dan Oprasional 57
3.7.1 Definisi Konsep 57
3.7.2 Definisi Oprasional 58
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN **60**
4.1 Hasil Penelitian 60
4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 60

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 21/8/25
Access From (repository.uma.ac.id)21/8/25

4.1.2 Gambaran Umum Kabupaten Mandailing Natal 60
4.1.3 Gambaran Umum Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan 62
4.1.4 Tugas Pokok Dan Fungsi 63
4.1.5 Visi Dan Misi 64
4.1.6 Struktur Organisasi 64
4.2 Pembahasan Penelitian 66
4.2.1 Analisis Implementasi Sistem Informasi ASN 66
4.2.2 Faktor Penghambat Implementasi SisteM Informasi 74
BAB V PENUTUP 77
5.1 Kesimpulan 77
5.2 Saran 79
DAFTAR PUSTAKA 80
DAFTAR LAMPIRAN 82

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 21/8/25
Access From (repository.uma.ac.id)21/8/25

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran……47
Gambar 4.1 Struktur Organisasi ……..41

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 21/8/25
Access From (repository.uma.ac.id)21/8/25

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu…….44

Tabel3.1 Waktu Penelitian ……...……51

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 21/8/25

Access From (repository.uma.ac.id)21/8/25

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Wawancara ……...…….82

Lampiran 2 Surat Izin Turun Lapangan ……...……87

Lampiran 3 Surat Izin Instansi Ambil Data Dan Wawancara …….....88

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 21/8/25
Access From (repository.uma.ac.id)21/8/25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era informasi sekarang penerapan teknologi informasi telah wajib dilakukan di instansi pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, pemerintah juga dituntut untuk melakukan reformasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya, termasuk dalam pelayanan kepada publik, yang berbasis teknologi informasi. Dalam memberikan layanan, Pemerintah harus mampu memberikan informasi yang lengkap dan komprehensif kepada masyarakat agar tidak terjadi kesalah pahaman yang dapat melemahkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah. (Margono, 2011).

Penggunaan media elektronik merupakan faktor yang sangat penting dalam berbagai kegiatan, khususnya dalam memberikan pelayanan. Oleh karena itu penataan dalam kegiatan pelayanan melalui e-government harus diarahkan untuk mendorong terwujudnya masyarakat informasi. Kedudukan dan peranan pegawai aparatur sipil negara sangat penting dan menentukan bagi negara karena pegawai aparatur sipil negara adalah unsur aparatur negara, abdi negara sekaligus abdi masyarakat untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional. Berdasarkan intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan egovernment, dijelaskan bahwa pengembangan e-government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis menggunakan elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan *e-government* dilakukan

Document Accepted 21/8/25
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)21/8/25

penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi.(Widiyaning, 2012).

Salah satu perwujudan dari *e-government* adalah dengan mengembangkan sebuah sistem informasi manajemen Aparatur Sipil Negara (SIMASGARA). Sebagai implementasi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan. Pemberlakuan otonomi daerah menuntut setiap daerah lebih mandiri dalam mengurus rumah tangganya serta mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, proses pemandirian ini sekaligus merupakan pemberdayaan bagi sumber daya manusia di daerah. Dalam peraturan Bupati Mandailing Natal No. 49 tahun 2022 tentang ketentuan umum pasal 1 ayat 13 bahwa sistem manajemen aparatur sipil negara (SIMASGARA) yang dibangun untuk menyederhanakan pelayanan dibidang kepegawaian. dengan tujuan agar Badan Kepegawaian Daerah dapat memiliki kemampuan mengelola serta memberikan berbagai informasi tentang pegawai aparatur sipil negara yang mencakup perencanaan, pengembangan kualitas sumber daya pegawai aparatur sipil negara dan administrasi kepegawaian, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan dan pemeliharaan informasi kepegawaian, serta mendukung perumusan kebijaksanaan kesejahteraan pegawai aparatur sipil negara.

Pegawai aparatur sipil negara (ASN) perlu diatur secara menyeluruh dengan menerapkan sistem informasi kepegawaian. Hal tersebut memerlukan dukungan aplikasi sistem informasi manajemen kepegawaian yang memadai. Dengan adanya aplikasi sistem informasi manajemen kepegawaian mampu menyediakan data dan informasi yang mudah dan cepat yang berhubungan dengan kepegawaian serta tercipta kesesuaian antara arus informasi dengan sistem pengolahan data

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 21/8/25
Access From (repository.uma.ac.id)21/8/25

yang diterapkan. Sehubungan dengan bergeraknya sebuah organisasi menuju ke arah pelaksanaan suatu sistem informasi lengkap dan maju, maka diperlukan suatu aplikasi yang dapat diterapkan pada sistem informasi manajemen kepegawaian.

Sistem informasi manajemen kepegawaian dirancang sesuai dengan perkembangan dan kesiapan aplikasi sistem informasi kepegawaian yang memerlukan pengembangan melalui alih teknologi Hal tersebut perlu dilaksanakan dengan alasan: Untuk menjamin kelancaran proses pelayan diperlukan keseragaman aplikasi data yang memungkinkan pengendalian optimal atas aktivitas administrasi pemerintah daerah. Frekuensi perubahan data ketatausahaan semakin banyak. Untuk menyusun berkas induk yang bersih, lengkap dan *up-to-date*, aplikasi berbasis web akan sangat membantu. Terbentuknya database himpunan data kepegawaian yang dapat menampung, mengolah, menyimpan, menemukan kembali dan mendistribusikan data pegawai. Sehingga akan memudahkan pegawai dalam mendapatkan informasi yang cepat, tepat dan akurat demi tercapainya tujuan organisasi.

Badan Kepegawaian pengembangan sumber daya manusia Kabupaten Mandailing Natal sebagai salah satu dari pemerintah yang mengelola pelayanan kepegawaian mulai mengimplementasikan sistem informasi manajemen kepegawaian untuk meningkatkan kualitas pengelolaan kepegawaian. Sistem informasi manajemen kepegawaian berbasis web di Kabupaten Mandailing Natal. Sistem ini selain menyajikan informasi yang terkait dengan kepegawaian, juga dikhususkan untuk meningkatkan pelayanan di bidang mutasi dan bidang-bidang lainnya misalnya pada saat pimpinan dalam pengambilan kebijakan khususnya pada saat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan menyusun

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 21/8/25
Access From (repository.uma.ac.id)21/8/25

pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dari dan dalam jabatan untuk memberikan pertimbangan kepada Pembina Kepegawaian dalam penyusunan daftar nama yang akan di mutasi khususnya pada saat promosi jabatan, sehingga diharapkan dengan adanya output dari Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian dapat mempermudah dan mempercepat pimpinan dalam menentukan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang tepat sesuai dengan kualifikasi dalam menduduki suatu jabatan sehingga keputusan berkualitas dan objektif.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik dalam melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **"Analisis Implementasi Sistem Informasi Manajemen Aparatur Sipil Negara (SIMASGARA) Pada Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mandailing Natal".**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraiakan diatas, maka perumusan masalah yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Sistem Informasi Manajemen Aparatur Sipil Negara (SIMASGARA) Pada Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mandailin Natal?
2. Apa saja faktor penghambat Implementasi Sistem Informasi Manajemen Aparatur Sipil Negara (SIMASGARA) Pada Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mandailin Natal?

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 21/8/25
Access From (repository.uma.ac.id)21/8/25

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diungkapkan oleh peneliti, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis Implementasi Sistem Informasi Manajemen Aparatur Sipil Negara (SIMASGARA) Pada Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mandailin Natal.
2. Untuk menganalisis faktor penghambat Implementasi Sistem Informasi Manajemen Aparatur Sipil Negara (SIMASGARA) Pada Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mandailin Natal.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian tujuan penelitian diatas , yang menjadi manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Secara teoritis Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada bidang kepegawaian dan sistem informasi manajemen.
2. Secara praktis Diharapkan penelitian ini menjadi masukkan untuk menentukan kebijakan tentang menajemen kepegawaian yang di dukung oleh teknologi informasi.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 21/8/25
Access From (repository.uma.ac.id)21/8/25

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Implementasi

Secara umum Implementasi dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah suatu implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi merupakan sebuah penempatan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap (Haji, 2020).

Menurut teori Magdalena (2020) menyebutkan implementasi merupakan aktivitas yang saling menyesuaikan. Implementasi merupakan sistem rekayasa. Pengertian tersebut memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Mulyasa (2021) juga menyebutkan pengertian implementasi bahwa implementasi merupakan suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap. Implementasi Menurut teori Mulyadi, (2015;12) merupakan mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan teori lain Menurut Dwiyanto (2017:143) juga menjelaskan bahwa implementasi ini menunjuk

Document Accepted 21/8/25
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)21/8/25

aktivitas menjalankan program dalam ranah senyatanya, baik yang dilakukan oleh organ pemerintah maupun para pihak yang telah ditentukan dalam program implementsi sendiri biasanya ada yang disebut sebagai pihak implementor dan kelompok sasaran.

Menurut teori *George C. Edwards III* (1974) implementasi merupakan sumber yang penting meliputi, staff yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik. Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak faktor atau varible dan masing-masing variable tersebut saling berhubungan satu dengan yang lainnya, Dalam teori ini dapat dilihat beberapa faktor yang menjadi indikator implementasi dalam kebijakan pemerintah sebagai berikut :

a. Komunikasi

Dalam suatu organisasi, komunikasi merupakan suatu proses didalam suatu organisasi yang kompleks dan rumit. seseorang bisa meyebarluaskannya dan menahannya hanya untuk kepentingan tertentu. Di samping itu sumber informasi yang berbeda juga akan melahirkan interpretasi yang berbeda pula. Agar implementasi dapat berjalan secara efektif siapa yang bertanggung jawab dalam mengambil keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat malakukannya. Sesungguhnya implementasi kebijakan harus diterima oleh semua personel dan harus mengerti secara jelas dan akurat mengenahi maksud dan tujuan kebijakan.Terdapat beberapa indikator dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi dijelaskan sebagai berikut:

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 21/8/25
Access From (repository.uma.ac.id)21/8/25

1. Penyaluran komunikasi yang baik yang disebut dengan Transmisi, akan menghasilkan komunikasi yang baik pula, sering kali terjadi dalam komunikasi adalah salah pengertian.
2. Adanya kejelasan, ini dimaksud bahwa komunikasi yang diterima para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan. Adanya ketidakjelasan komunikasi akan menghambat implementasi, pada tataran tertentu saja dan pelaksana membutuhkan fleksibilitas.
3. Perimtah yang diberikan harus Konsistensi dalam melaksanakan sebuah kebijakan haruslah konsisten dan jelas, karana jika sering berubah maka akan mengakibatkan kebingungan pada pelaksana pembuat kebijakan itu sendiri.

b. Sumber Daya

Tidak menjadi masalah bagaimana jelas dan konsiten implementasi kebijakan program dan bagaimana akuratnya komunikasi dikirim. Jika personel yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program kekurangan sumber daya dalam melakukan tugasnya. Komponen tersebut meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin program dapat diarahkan kepada yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dipakai seperti dana dan sarana prasarana untuk kelancaran kegiatan program.

Ketidakmampuan pelaksana program ini disebabkan karena kebijakan konservasi energi merupakan hal yang baru bagi mereka dimana melaksanakan program membutuhkan kemampuan yang khusus, palitidak mereka menguasai tehnik-tehnik kelistrikan. Sumber daya lain yang juga penting adalah kewenangan

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 21/8/25
Access From (repository.uma.ac.id)21/8/25

untuk menetukan bagaiman program dilakukan, kewenangan untuk membelanjakan/mengatur keuangan, baik penyediaan uang, pengadaan staf, maupun pengadaan supervisor.

c. Sikap atau Disposisi

Efektifitas implementasi merupakan faktor yang mempengaruhi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi apabila berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implemnetasi akan menjadi banyak masalah. Ada tiga bentuk sikap/respon implementor terhadap kebijakan yaitu kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut. Para pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran program namun seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat karena mereka menolak tujuan yang ada didalamnya sehingga secara tersembunyi mengalihkan dan menghindari implementasi program. Disamping itu dukungan para pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran program

d. Struktur Biokrasi

Berbicara mengenai struktur birokrasi tidak terlepas dari badan pelaksana suatu kebijakan. Struktur birokrasi merupakan karakteristik, pola, norma serta hubungan yang terjadi secara berulang dalam badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Implementasi akan gagal apabila struktur birokrasi yang ada menghalangi koordinasi dan apabila sumber daya cukup untuk melaksanakan suatu kebijakan dan para implementor mengetahui apa yang harus dilakukan,

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 21/8/25
Access From (repository.uma.ac.id)21/8/25

yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan. Kebijakan yang komplek membutuhkan kerjasama banyak orang, serta pemborosan sumber daya akan mempengaruhi hasil implementasi. Perubahan yang dilakukan tentunya akan mempengaruhi individu dan secara umum akan mempengaruhi sistem

Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Browne dan Wildavsky (Usman, 2004:7) mengemukakan bahwa "implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan" sedangkan jika menurut Syaukani dkk (2004:295) implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup, persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. kemudian menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijaksanaan tersebut. lalu bagaimana mengahantarkan kebijaksanaan secara kongkrit ke masyarakat.

Berdasarkan pandangan tersebut diketahui bahwa proses implementasi kebijakan sesungguhnya tidak hanya menyangkut prilaku badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi prilaku dari semua pihak yang terlibat untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil kegiatan pemerintah.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 21/8/25
Access From (repository.uma.ac.id)21/8/25

Menurut Daniel A. Mazmanian dalam Wahab (2005 : 65) menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implemetasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian Implementasi melibatkan usaha dari policy makers untuk memengaruhi apa yang oleh Lipsky disebut "street level bureaucrats" untuk memberikan pelayanan atau mengatur prilaku kelompok sasaran target group.

Kebijakan yang sederhana, implementasi hanya melibatkan satu badan yang berfungsi sebagai implementor, misalnya, kebijakan pembangunan infrastruktur publik untuk membantu masyarakat agar memiliki kehidupan yang lebih baik, Sebaliknya untuk kebijakan makro, misalnya, kebijakan pengurangan kemiskinan di pedesaan, maka usaha-usaha implementasi akan melibatkan berbagai institusi, seperti birokrasi kabupaten, kecamatan, pemerintah desa. Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. untuk memperkaya pemahaman kita tentang berbagai variabel yang terlibat didalam implementasi, maka dari itu ada beberapa teori implementasi.

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (Wibawa (2005 : 36) yang menjelaskan bahwa implementasi dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan dan lingkungan (konteks) implementasi, kedua hal tersebut harus didukung oleh program aksi dan proyek individu yang didesain dan dibiayai

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 21/8/25
Access From (repository.uma.ac.id)21/8/25

berdasarkan tujuan kebijakan, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan akan memberikan hasil berupa dampak pada masyarakat, individu dan kelompok serta perubahan dan penerimaan oleh masyarakat terhadap kebijakan yang terlaksana. variabel isi kebijakan menurut Grindle mencakup beberapa yang meliputi:

a. Kepentingan kelompok sasaran atau target groups dalam isi kebijakan.
b. Jenis manfaat yang diterima oleh target group
c. Derajat perubahan yang diharapkan dari sebuah kebijakan.
d. Letak pengambilan keputusan.
e. Pelaksana program telah disebutkan dengan rinci, dan
f. Dukung oleh sumber daya yang dilibatkan.

Sedangakan variabel lingkungan kebijakan mencakup beberapa yang meliputi sebagai berikut:

a. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan.
b. Karakteristik lembaga dan rejim yang sedang berkuasa.
c. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran

Di sini kebijakan yang menyangkut banyak kepentingan yang berbeda akan lebih sulit diimplementasikan dibanding yang menyangkut sedikit kepentingan. Oleh karenanya tinggi-rendahnya intensitas keterlibatan berbagai pihak politisi, pengusaha, masyarakat, kelompok sasaran dan sebagainya dalam implementasi kebijakan akan berpengaruh terhadap efektivitas implementasi kebijakan

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 21/8/25
Access From (repository.uma.ac.id)21/8/25

Tahapan implementasi kebijakan yang menempatkan kebijakan dalam pengaruh berbagai faktor dalam rangka pelaksanaan kebijakan itu sendiri. Disini akan dapat dipahami, bagaimana kinerja dari suatu kebijakan, bagaimana isi yang berinteraksi dengan kelompok sasaran dan bagaimana sejumlah faktor yang berasal dari lingkungan (politik, sosial dan lain-lainnya) berpengaruh pada pelaksanaan kebijakan. Meter dan Horn dalam Sujianto (2008:35) mengatakan, bahwa yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan antara lain :

a. Standar dan Tujuan Kebijakan Standar dan tujuan kebijakan memberikan perhatian utama pada faktor-faktor yang menentukan hasil kerja, maka identifikasi indikator-indikator hasil kerja merupakan hal yang penting dalam analisis. Karena indikator ini menilai, sejauh mana standar dan tujuan menjelaskan keseluruhan kebijakan, ini terbukti karena mudah diukur dalam berbagai kasus.
b. Sumberdaya Kebijakan Implementasi kebijakan bukan hanya pada standar dan tujuan, tetapi juga menyediakan sumberdaya yang digunakan untuk memudahkan administrasi. Sumberdaya yang dimaksudkan meliputi dana dan insentif yang diharapkan dapat menunjang implementasi yang efektif.
c. Aktifitas Pengamatan dan Komunikasi Interorganisasional Implementasi yang efektif memerlukan standar dan tujuan program dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab
d. Agar implementasi tercapai. Maka perlu melibatkan komunikasi yang konsisten dengan maksud mengumpulkan informasi. Komunikasi antara organisasi merupakan hal yang kompleks.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 21/8/25
Access From (repository.uma.ac.id)21/8/25

e. Karakteristik Pelaksana Struktur birokrasi dianggap karakteristik, norma dan pola hubungan dalam eksekutif yang memiliki aktual atau potensial dengan apa yang dilakukan dalam kebijakan, lebih jelasnya karakteristik berhubungan dengan kemampuan dan kriteria staf tingkat pengawas kontrol hirarkis terhadap keputusan-keputusan sub unit dalam proses implementasi. Sumberdaya pelaksana, validitas organisasi, tingkat komunikasi terbuka, yaitu jaringan komunikasi vertikal dan horizontal dalam organisasi hubungan formal dan informal antara pelaksana dengan pembuat kebijakan.

f. Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik Pada waktu implementasi kebijakan tidak terlepas dari pengaruh ekonomi, sosial dan politik Ekosospol Pengaruh Eksospol terhadap kebijakan pemerintah telah menjadi perhatian utama, walau dampak dari faktor ini baru sedikit mendapat perhatian. Tapi faktor ini memiliki efek yang menonjol terhadap keberhasilan aktivitas pelaksana. Apakah karakteristik pertisipan dari organisasi pelaksana ada oposisi atau dukungan partisipan untuk kebijakan tersebut.

2.2 Teori Sistem Informasi Manajemen

Menurut Waver (1949) sistem informasi manajemen Merupakan karya yang termasuk dalam salah satu teori sistem komunikasi yang tertua dan merupakan teori yang melihat komunikasi sebagai proses yaitu komunikasi sebagai transmisi pesan. Fokus utama pada teori informasi adalah untuk menentukan cara dimana saluran channel komunikasi dapat digunakan secara efisien.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 21/8/25
Access From (repository.uma.ac.id)21/8/25

Komunikasi sebagai proses linier dan ingin mengembangkan suatu model yang dapat menjelaskan bagaimana pengirim sejumlah informasi yang maksimum melalui saluran yang ada, dan bagaimana mengukur kapasitas dari saluran yang ada untuk membawa informasi. Mereka menggunakan asumsi bahwa komunikasi antar manusia itu ibarat hubungan melalui telepon dan gelombang radio. Jika ternyata komunikasi yang dilakukan tidak berhasil mengubah perilaku lawan bicara agar mau mengikuti apa-apa yang dimaksudkan oleh komunikator, maka komunikasi yang dilakukan dianggap mengalami gangguan. Lebih dari itu komunikasi yang dilakukan dilihat juga sebagai komunikasi yang tidak efektif, atau komunikasi yang gagal.

Teori sistem informasi *New Media* digunakan sejak tahun 1960-an yang telah mencakup seperangkat teknologi komunikasi terapan yang semakin berkembang dan beragam, Media massa telah berubah begitu banyak dimulai dari abad ke-20 yang bersifat satu arah, arus yang serupa kepada massa yang beragam. Terdapat alasan sosial, ekonomi, dan teknologi atas pergeseran ini yang cukup nyata. Kedua, teori masyarakat massa juga menunjukkan munculnya jenis masyarakat baru yang berbeda dari masyarakat massa yang dicirikan dengan jaringan komunikasi interaktif yang rumit.

Sistem informasi manajemen menggunakan aplikasi berbasis web meliputi modul referensi kepegawaian, modul biodata pegawai, modul perencanaan formasi, modul riwayat pegawai, modul perhitungan gaji pegawai, modul penilaian angka kredit, modul mutase pegawai, modul transfer data, modul fasilitas laporan. Tujuan dari adanya aplikasi web ini menghasilkan informasi data kepegawaian untuk membantu pimpinan dalam merencanakan formasi,

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 21/8/25
Access From (repository.uma.ac.id)21/8/25

pengadaan, penerimaan, merencanakan mutasi membantu kelencaran administrasi manajemen kepegawaian dan pengajian serta meningkatkan kinerja pelayanan terhadap pegawai memudahkan pelaksanaan pekerjaan yang bersifat rutin dalam pembuatan laporan.

Gordon B. Davis mengemukakan bahwa sistem informasi manajemen merupakan suatu sistem manusia dan mesin yang terpadu untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi, manajemen, dan proses pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Soetedjo Moeljodiharjo berpendapat bahwa sistem informasi manajemen merupakan suatu metode yang menghasilkan informasi yang tepat waktu yang digunakan untuk langkah pengambilan keputusan dalam rangka memperbaiki perencanaan dan pengendalian.

Robert W. Holmes juga mengartikan sistem informasi manajemen sebagai suatu sistem yang dirancang untuk menyajikan informasi pilihan yang berorientasi kepada keputusan guna merencanakan, mengawasi, dan menilai aktivias organisasi yang dirancang dalam kerangka kerja. D. Joseph F. Kelly menyatakan bahwa sistem informasi manajemen merupakan perpaduan antara sumber daya manusia dengan sumber daya lainnya yang berlandaskan komputer sehingga menghasilkan kumpulan penyimpanan, perolehan kembali, komunikasi, dan penggunan data untuk tujuan operasi manajemen yang efisien. Berdasarkan pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem informasi manajemen dalam pendidikan merupakan rangkaian keterkaitan antara sumber daya manusia dengan aplikasi teknologi informasi yang digunakan untuk menyimpan, mengolah, dan mengambil kembali data dalam rangka untuk mendukung proses pengambilan keputusan dalam bidang Pendidikan

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 21/8/25
Access From (repository.uma.ac.id)21/8/25

Menurut Robert A. Leitch, sistem informasi adalah “suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan”. Sistem Informasi memiliki komponen fisik seperti :

1. Perangkat keras komputer : CPU, Storage, perangkat Input/Output, Terminal untuk interaksi, Media komunikasi data
2. Perangkat lunak komputer : perangkat lunak sistem sistem operasi dan utilitinya, perangkat lunak umum aplikasi bahasa pemrograman,
3. Basis data : penyimpanan data –data pada media penyimpan komputer.
4. Prosedur : langkah-langkah dalam penggunaan sistem
5. Personil untuk pengelolaan operasi (SDM), meliputi:
    1) Clerical personnel : untuk menangani transaksi dan pemrosesan data dan melakukan inquiry / operator.
    2) First level manager : untuk mengelola pemrosesan data didukung dengan perencanaan, penjadwalan, identifikasi situasi out-of-control dan pengambilan keputusan level menengah ke bawah.
    3) Staff specialist : digunakan untuk analisis untuk perencanaan dan pelaporan.
    4) Management : untuk pembuatan laporan berkala, permintaan khsus, analisis khusus, laporan khsusus, pendukung identifikasi masalah dan peluang.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 21/8/25
Access From (repository.uma.ac.id)21/8/25

Pengelola sistem informasi terorganisasi dalam suatu struktur manajemen. Oleh karena itu bentuk/jenis sistem informasi serta jumlah orang yang diperlukan sesuai dengan level manajemennya yaitu :

1. Manajemen Level Atas: untuk perencanaan strategis, kebijakan dan pengambilan keputusan.
2. Manejemen Level Menengah: untuk perencanaan taktis.
3. Manejemen Level Bawah: untuk perencanan dan pengawasan operasi
4. Operator: untuk pemrosesan transaksi dan merespon permintaan. Untuk pengembangan sebuah sistem informasi diperlukan struktur manajemen organisasi personil

Semakin tinggi tingkat manajemen Sistem Informasi, maka makin sedikit orang yang dibutuhkan dan semakin tinggi wewenang yang dimiliki. Pelaku sistem terdiri dari 7 kelompok yaitu :

1. Pemakai, yang terdiri dari operasional, pengawas dan eksekutif.
2. Manajemen, Umumnya terdiri dari jenis manajemen, yaitu manajemen pemakai yang bertugas menangani pemakaian dimana sistem baru diterapkan, manajemen sistem yang terlibat dalam pengembangan sistem itu sendiri dan manajemen umum yang terlibat dalam strategi perencanaan sistem dan sistem pendukung pengambilan keputusan.
3. Pemeriksaan, Ukuran dan kerumitan sistem yang dikerjakan dan bentuk alami organisasi dimana system tersebut diimplementasikan dapat menentukan kesimpulan perlu tidaknya pemeriksa. Pemeriksa biasanya menentukan segala sesuatunya berdasarkan ukuran-ukuran standar yang dikembangkan pada banyak perusahaan sejenis.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 21/8/25
Access From (repository.uma.ac.id)21/8/25

4. Penganalisa sistem, Fungsi-fungsinya antara lain yaitu :
    1) Arkeolog : yaitu yang menelusuri bagaimana sebenarnya sistem lama berjalan, bagaimana sistem tersebut dijalankan dan segala hal yang menyangkut sistem lama.
    2) Inovator : yaitu yang membantu mengembangkan dan membuka wawasan pemakai bagi kemungkinan-kemungkinan lain.
    3) Mediator : yaitu yang menjalankan fungsi komunikasi dari semua level, antara lain pemakai, manajer, programmer, pemeriksa dan pelaku sistem yang lainnya yang mungkin belum punya sikap dan cara pandang yang sama.
    4) Pimpinan proyek : Penganalisa sistem haruslah personil yang lebih berpengalaman dari programmer atau desainer. Selain itu mengingat penganalisa sistem umumnya ditetapkan terlebih dahulu dalam suatu pekerjaan sebelum yang lain bekerja, adalah hal yang wajar jika penanggung jawab pekerjaan menjadi porsi penganalisa sistem.
5. Pendesain sistem yaitu penerima hasil penganalisa sistem berupa kebutuhan pemakai yang tidak berorientasi pada teknologi tertentu, yang kemudian ditransformasikan ke desain arsitektur tingkat tinggi dan dapat diformulasikan oleh programmer.
6. Programmer yaitu yang mengerjakan dalam bentuk program dari hasil desain yang telah diterima dari pendesain.
7. Personel pengoperasian yaitu Orang yang bertugas dan bertanggungjawab di pusat komputer misalnya jaringan, keamanan perangkat keras, keamanan perangkat lunak, pencetakan dan backup.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 21/8/25
Access From (repository.uma.ac.id)21/8/25

2.3 Teknologi Informasi & Komunikasi

Menurut Martin (2003), Teknologi Informasi tidak hanya terbatas pada Teknologi Informasi *Hardware* dan *Software* yang digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, serta juga mencakup teknologi komunikasi yang mengirimkan sebuah informasi. Kemajuan teknologi yang menyatukan kemajuan komputerisasi, televisi, radio, dan telepon menjadi satu kesatuan terintegrasi terbentuk sebagai revolusi informasi dan komunikasi global. Revolusi ini terwujud dari kemajuan teknologi di bidang komputer pribadi, komunikasi data dan kompresi, *bandwidth*, data s*torage* dan data *access*, integrasi multimedia dan jaringan komputer. Teknologi Informasi dan komunikasi dapat menjadi alat pendorong kearah kemajuan bangsa. Hal ini merupakan jembatan menuju bangsa yang maju dimana masyarakat dapat memiliki alat yang membantu mengembangkan usaha dan menikmati hasilnya secara mudah, murah dan merata.

Dalam kamus Oxford (1995) Teknologi Informasi adalah studi atau peralatan elektronik, terutama komputer, untuk menyimpan, menganalisa dan mendistribusikan informasi, termasuk kata-kata, bilangan dan gambar. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dapat membantu memberi perubahan besar di banyak negara. Dalam era global sekarang ini tidak ada lagi sekat dalam hal akses informasi, sehingga semua lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk mengembangkan diri dalam segala aspek kehidupan. Tentunya kita sebagai masyarakat Indonesia tidak dapat menolak terhadap “booming” Teknologi Informasi dan Komunikasi.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 21/8/25
Access From (repository.uma.ac.id)21/8/25

Dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi gelombang minat bagaimana komputer dan Internet yang terbaik dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efesiensi dan efektivitas pendidikan pada semua jenjang dan secara formal dan non-formal pengaturan. Tetapi TIK lebih dari sekadar teknologi tua seperti telepon, radio, dan televisi, meskipun sekarang mendapat perhatian, memiliki sejarah lebih panjang dan lebih kaya sebagai pembelajaran tools. Misalnya, radio dan televisi sudah selama empat puluh tahun telah digunakan untuk pembejaran jarak jauh, meskipun masih mencetak termurah, paling mudah diakses dan yang paling dominan sehingga mekanisme pengiriman negara maju dan berkembang. Penggunaan komputer dan internet masih belum matang di negara-negara berkembang, karena infrastruktur yang terbatas dan tingginya biaya akses.

Selain itu teknologi yang berbeda biasanya digunakan dalam kombinasi daripada sebagai mekanisme pengiriman tunggal. Misalnya radio komunitas Kothmale internet menggunakan siaran radio baik dan komputer dan teknologi internet untuk memudahkan berbagi informasi dan memberi kesempatan pendidikan dalam masyarakat pedesaan di Sri Lanka. Universitas Terbuka Britania Raya (UKOU), didirikan pada tahun 1969 sebagai lembaga pendidikan pertama di dunia yang sepenuhnya didedikasikan untuk pembelajaran terbuka dan jarak jauh, masih sangat bergantung pada bahan cetak berbasis dilengkapi dengan radio, televisi, dan dalam berberapa tahun terkahir, online *programming.* Demekian pula, *Indira Gandhi National Open University* di India menggabungkan penggunaan cetak, direkam audio dan video, siaran radio dan televisi, dan teknologi audio c*onferencing*. Berikut ini adalah beberapa jenis

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 21/8/25
Access From (repository.uma.ac.id)21/8/25

Teknologi Informasi dan komunikasi yang umum digunakan dalam pendidikan yang meliputi :

a. *E-Learning* Meskipun paling sering dikaitkan dengan pendidikan tinggi dan pelatihan perusahaan, *e-learning* meliputi pembelajaran pada semua tingkatan, baik formal dan non-fomal, yang menggunakan intranet (LAN) atau *extranet* (WAN), untuk seluhruhnya atau bagian, interaksi, fasilitasi. Beberpa pihak lain lebih memilih istilah Online *Learning*. Pembelajaran berbasis Web adalah himpunan bagian dari *E-learning* dan mengacu pada pembelajaran menggunkan *browser-browser* seperti *Internet Explorer, Moxilla Firefox, Opera, Netscape* atau *Internet Exploerer*.
b. *Blended learning Blended learning* adalah suatu model pembelajaran yang mencoba menggabungkan beberapa model pembelajaran yang telah ada. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, terutama dalam teknologi jaringan berupa internet, umumnya model-model pembelajaran yang digabungkan itu berupa model pembelajaran *face-to-face offline learning,* dan *online learning*. *Model online learning* dapat berupa pembelajaran dengan menggunakan *Web, blog, e-learning,* dan sebagainya. Sedangkan ofline learning dapat berupa pembelajaran menggunakan CD, DVD, OHP dan sebagainya. Tujuan umum pembelajaran model blended ini adalah untuk mencari kombinasi model-model pembelajaran yang efektif. Pada akhirnya, model pembelajaran ini bertujuan untuk mencapai keefektifan pembelajaran.
c. Pembelajaran Jarak Jauh *Rudestan* dan *Schoenholtz* mengatakan bahwa Pembelajaran Jarak Jauh adalah pembelajaran dengan menggunakan suatu

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 21/8/25
Access From (repository.uma.ac.id)21/8/25

media yang memungkinkan terjadi interaksi antara guru dan siswa. Dalam pembelajaran jarak jauh antara guru dan siswa tidak bertatap muka secara langsung, pembelajaran dimungkinkan anatara guru dan siswa berbeda tempat bahkan bisa dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh, sehinnga memudahkan proses pembelajaran.

d. Belajar Berbantuan Komputer Komputer digunakan di berbagai bidang, seperti kantor, sekolah, dan rumah. Pada saat ini komputer merupakan alat komunikasi yang paling utama bagi miliaran orang. Pengusaha berhubungan dengan klien, pendidik dengan siswa, serta seseorang dengan teman dan anggota lainnya. Program pembelajaran berbantuan komputer ini memanfaatkan seluruh kemamapuan komputer, terdiri dari gabungan hampir seluruh media, yaitu: teks, grafis, gambar, foto, audio,video dan animasi. Seluruh media tersebut secara konvergen, akan saling mendukung dan melebur menjadi satu media yang luar biasa kemampuannya. Salah satu keunggulan komputer ini yang tidak dimiliki oleh berbagai media lain, ialah kemampuannya untuk memfasiltasi interaktivitas peserta didik dengan sumber belajar yang ada pada computer.

2.4 E-Government

E-Government digunakan sebagai kependekan dari elektronik pemerintah dikenal *e-gov*, pemerintah digital, online pemerintah atau pemerintah transformasi. *E-Government* adalah Suatu upaya untuk mengembangkan penyalenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik. Suatu penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 21/8/25
Access From (repository.uma.ac.id)21/8/25

pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. *e-Government* dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses kepemerintahan yang demokratis.

Menurut Richardus Eko Indrajit (2006), tantangan terbesar yang dihadapi oleh pemerintah maupun masyarakat dalam mengembangkan konsep pemerintah *e-Government* di negaranya masing-masing, yaitu;

a. Tantangan yang berkaitan dengan cara menciptakan dan menentukan kanal-kanal akses digital (maupun elektronik) yang dapat secara efektif dipergunakan oleh masyarakat maupun pemerintah
b. Tantangan yang berkaitan dengan keterlibatan lembaga-lembaga lain di luar pemerintah (pihak komersial swasta maupun pihakpihak non komersial lainnya) dalam mengembangkan infrastruktur maupun superstruktur e-Government yang dibutuhkan
c. Tantangan yang berkaitan dengan penyusunan strategi institusi terutama yang berkaitan dengan masalah biaya investasi dan operasional sehingga program manajemen perubahan eGovernment ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diinginkan

Menurut Bank Dunia (Samodra Wibawa 2009:113), *E-Government* adalah penggunaan teknologi informasi oleh instansi pemerintah seperti *wide area Networks* (WAN) internet, *moble competing*, yang dapat digunakan untuk membangun hubungan dengan masyarakat, dunia usaha dan instansi pemerintah lainnya. Menurut *The World Bank Group* (Falih Suaedi, Bintoro Wardianto 2010:54), *E-Government* ialah sebagai upaya pemamfaatan informasi dan

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 21/8/25
Access From (repository.uma.ac.id)21/8/25

teknologi komunikasi untuk meningkatkan efesiensi dan efektivitas, transfaransi dan akuntabilitas pemerintah dalam memberikan pelayanan publik secara lebih baik. Kemudian menurut Depkomenfo (Samodra Wibawa 2009:114), mendefinisikan *E-Goverment* adalah pelayanan publik yang diselenggarakan melalui situs pemerintah dimana domain yang digunakan juga menunjukkan domain pemerintah Indonesia yakni (go.id)

Menurut Clay G. Weslatt (2007) *E-Goverment* adalah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mempromosikan pemerintah yang lebih effisien dan penekanan biaya yang efektif, kemudian pasilitas layanan terhadap masyarakat umum dan membuat pemerintah lebih bertanggung jawab kepada masyarakat. Sedangkan dalam buku *E-Goverment In Action* (2005:5) menguraikan *E-Goverment* adalah suatu usaha menciptakan suasana penyelanggaraan pemerintah yang sesuai dengan objektif bersama dari sejumlah komunitas yang berkepentingan, oleh karena itu visi yang dicanangkan juga harus mencerminkan visi bersama dari pada stakholeder yang ada misalnya:

a. Memperbaiki produktifitas dan kinerja operasional pemerintah dalam melayani masyarakatnya;
b. Mempromosikan pemerintah yang bersih dan transparans;
c. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat meluli kinerja pelayanan
d. Menjamin terciptanya penyelengaaan negara yang demokratis;

Karena visi tersebut berasal “Dari, Oleh dan Untuk” masyarakat atau komunitas dimana E-Goverment tersebut diimplementasikan, maka masanya akan sangat bergantung pada stuasi dan kondisi masyarakat setempat. Sebagaimana dikemukakan diatas bahwa E-Goverment adalah upaya untuk penyelanggaraan

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 21/8/25
Access From (repository.uma.ac.id)21/8/25

pamerintah yang berbasis elektronik dalam rangka mengingkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif dan efesien. Dari pengertian diatas dapat diartikan bahwa *E-Goverment* merupakan proses pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat untuk membantu manjalankan sistem pemerintah secara efesien ada juga beberapa model penyampaian *e-Government* dapat dilihat sebagai berikut :

a. *Government-to-Customer* (G2C) Adalah penyampaian layanan publik dan informasi satu arah oleh pemerintah ke masyarakat, Memungkinkan pertukaran informasi dan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah, contohnya G2C : pajak online, mencari pekerjaan, layanan jaminan sosial, dokumen pribadi kelahiran dan akte perkawinan, aplikasi paspor, lisensi pengarah Layanan imigrasi, layanan kesehatan, beasiswa,
b. *Government-to-Business* (G2B) Adalah transaksi-transaksi elektronik dimana pemerintah menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan bagi kalangan bisnis untuk bertransaksi dengan pemerintah. Mengarah kepada pemasaran produk dan jasa ke pemerintah untuk membantu pemerintah menjadi lebih efisien melalui peningkatan proses bisnis dan manajemen data elektronik. Aplikasi yang memfasilitasi interaksi G2B maupun B2G adalah Sistem e-procurement. Contoh: Pajak perseroan, Peluang Bisnis, Pendaftaran perusahaan, peraturan pemerintah Pelelangan dan penjualan yang dilaksanakan oleh pemerintah, hak paten merk dagang,
c. *Government-to-Government* (G2G) Adalah Memungkinkan komunikasi dan pertukaran informasi online antar departemen atau lembaga pemerintahan melalui basis data terintegrasi. Contoh: Konsultasi secara online, blogging

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 21/8/25
Access From (repository.uma.ac.id)21/8/25

untuk kalangan legislative, pendidikan secara online, pelayanan kepada masyarakat secara terpadu.

Pengembangan *E-Government* berdasarkan Inpres No. 3 Tahun 2003 adalah upanya untuk mengembangkan penyelenggaraaan kepemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efesien. Untuk mengembangkan sistem manajemen dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi maka pemarintah harus segara melaksanakan proses transformasi *E-government*. Melalui pengembangan E-Government dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja dilingkungan pemerintah dengan cara :

a. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk mengeliminasi sekat-sekat organisai dan birokrasi;
b. Membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang memungkinkan instansi-instansi pemerintah berkerja secara terpadu, untuk menyederhanakan akses kesemua informasi layanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah

Ada banyak manfaat yang dapat dirasakan oleh pemerintah yang melaksanakan proses transformasi menuju E-Government, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stake holder nya baik masyarakat maupun kalangan bisnis dan industri;
b. Meningkatkan transfaransi, kontrol dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah;
c. Mengurangi biaya administrasi relasi dan interaksi;

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 21/8/25
Access From (repository.uma.ac.id)21/8/25

d. Memberiakn peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber pendapatan baru;
e. Menciptakan suatu lingkungan masyarakat informasi yang dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi;
f. Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai metra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara demokrasi

Konsep E-Government berkembang di atas kecendrungan keinginan masyarakat untuk dapat bebas memilih bilamana dan dimana mereka ingin berhubungan dengan pemerintahnya, serta bebas memilih berbagai akses yang sifatnya tradisional maupun moderen yang mungkin mereka berinteraksi selama 24 jam dan 7 hari dalam seminggu Kemajuan teknologi informasi memang telah berubah tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, merevolusi cara hidup masyarakat kian bergeser dari masyarakat indusri kepada masyarakat yang berbasis pengatahuan. Era informasi memberikan ruang lingkup yang sangat besar untuk mengorganisasikan kegiatan pemerintah melalui cara baru yang inovatif, transfaran yang lebih baik serta memberikan kenyamanan kepada publik dengan jalan memberikan pelayanan publik yang terintegrasi, intraktif dan imaginatif.

Berdasarkan sifat transaksi informasi dan pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah melalui jaringan informasi, pengembangan *E-Government* dapat dilaksanakan melalui tingkat (Hadwi Soendjojo dalam penelitian Yunus Jackson Obeng 2005:134) Meliputi;

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 21/8/25
Access From (repository.uma.ac.id)21/8/25

a. Tingkat Pertama (Persiapan)
    a) Pembuatan situs web sebagai media informasi dan komunikasi setiap lembaga;
    b) Sosialisai situs web untuk internal dan publik.
b. Tingkat Kedua (Pematangan)
    a) Pembuatan situs web informasi publik yang bersifat interaktif;
    b) Pembuatan antar keterhubungan dengan lembaga lain.
c. Tingkat Ketiga (Pemantapan)
    a) Pembuatan situs web yang bersifat transaksi pelayanan publik;
    b) Pembuatan interoperabilitas aplikasi dan data dengan lembaga lain
    c) Tingkat Keempat (Pemanfaatan) Pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat G2G, G2B, G2C.

Setiap perubahan berpotensi menimbulkan ketidak pastian, oleh karena itu pengembangan E-Government perlu direncanakan dan dilaksanakan secara sistematik melalu tahapan yang realistik dan sasaran yang terukur, sehingga dapat dipahami dan diikuti semua pihak. Berdasarkan sifat transaksi informasi dan pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah melalui jaringan informasi, pengembangan *E-Government* dapat dilaksanakan melalui 4 tingkatan sebagai berikut:

A. Tingkat 1 – Persiapan
    a) Pembuatan situs informasi disetiap lembaga;
    b) Penyiapan SDM;
    c) Penyiapan sarana akses yang mudah misalnya menyediakan sarana Multipurpose community center, warnet, SME-Center, dll;

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 21/8/25
Access From (repository.uma.ac.id)21/8/25

d) Sosialisasi situs informasi baik untuk internal maupun untuk publik;

B. Tingkat 2 – Pematangan

a) Perubahan situs informasi publik interaktif;

b) Pembuatan antar muka keterhubungan dengan lembaga lain.

C. Tingkat 3 – Pemantapan

a) Pembuatan situs transaksi pelayanan publik;

b) Pembuatan interoperabilitas aplikasi maupun data dengan lembaga pemanfaatan

c) Pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat G2G, G2B, dan G2C yang terintegrasi.

Dalam kategori operasional, beberapa hal yang mendapat perhatian dalam pengembangan E-Government antara lain:

a. Organisasi dan tata kerja pemerintah propinsi perlu mewadahi layanan E-Government secara efisien dan efektif.
b. Sumber daya manusia (sebagai the man behind the gun) perlu dikembangkan keahlian dan ketrampilannya dalam mengelola teknologi informasi dan komunikasi serta diperhatikan penghargaan (remunerasi) dan jalur kariernya.
c. Anggaran untuk pemeliharaan perangkat sama pentingnya anggaran untuk pengembangan, maka diperlukan anggaran yang cukup untuk secara terus-menerus memelihara mutu layanan E-Government,
d. Mendorong berbagai pihak untuk meningkatkan kemampuan dan kemauan dalam pengembangan, pengelolaan, dan pemutakhiran isi (content) data dan

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 21/8/25
Access From (repository.uma.ac.id)21/8/25

informasi secara berkelanjutan sehingga apa yang diperlukan oleh pihak terkait tersedia secara *real time*

Strategi pengembangan *E-Government* disusun dengan pendekatan perencanaan strategis yang bersifat luwes dan dinamis. Dengan pendekatan perencanaan strategis maka partisipasi *stakeholders* masyarakat dunia usaha dan perguruan tinggi diperlukan untuk meningkatkan rencana pengembangan ini. Untuk strategi pengembangan *E-Government* dapat dilakukan dengan cara:

a) Pembangunan infrastruktur dan akses jaringan komunikasi data yang memadai, yaitu: pengadaan sarana-prasarana pengembangan infrastruktur akses komunikasi data yang handal, pemberdayaan sumber daya atau kerjasama dengan swasta/masyarakat dalam penyediaan akses komunikasi data yang mudah, nyaman, dan dengan biaya terjangkau.
b) Pengembangan SDM untuk mengelola *E-Government*, yaitu: pelatihan SDM dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang pengoperasian *E-Government*, pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan profesionalitas tenaga fungsional teknologi informasi dan komunikasi, pemberian kepastian karier dan kesejahteraan yang memadai bagi SDM bidang teknologi informasi dan komunikasi.
c) Pengembangan perangkat-perangkat lunak yang diperlukan, meliputi: pemanfaatan koordinasi antara instansi dan internal instansi dalam pembuatan perangkat lunak yang diperlukan untuk mendukung E-Government secara umum, pemantapan koordinasi antarinstansi dan internal instansi dalam pembuatan perangkat lunak unggulan, pemantapan legalitas perangkat lunak, pemberdayaan atau kerjasama dengan berbagai pihak lain.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 21/8/25
Access From (repository.uma.ac.id)21/8/25

d) Pengembangan basis data dan basis pengetahuan pendukung *E-Government*, yaitu pemantapan koordinasi antarinstansi dan internal instansi dalam pembangunan basis data, pembangunan basis pengetahuan yang diperlukan untuk pengoperasian dan pengembangan berkelanjutan *E-Government*, pemberdayaan atau kerjasama dengan berbagai pihak dalam pembangunan basis data dan basis pengetahuan.

e) Pengembangan organisasi dan tata kerja yang mendukung *E-Government*, yaitu: pembentukan/penunjukan satu unit kerja atau instansi yang bertugas mengkoordinasikan pembangunan, pemeliharaan, pengendalian, pembentukan unit kerja di setiap instansi yang bertugas mengelola dan pemantapan koordinasi antarintansi.

f) Pembuatan aturan perundangan dan kebijakan yang diperlakukan untuk mendukung *E-Government* di daerah masing-masing.

g) Pemeliharaan dan perawatan perangkat lunak dan keras/jaringan, yaitu: perangkat lunak, pengelolaan portal internet pemeliharaan basis data dan basis pengetahuan

h) Pengembangan dan koordinasi layanan informasi yang mampu mendukung terwujudnya masyarakat yang kompetitif serta menarik investasi ke daerah yaitu: pengembangan dan koordinasi layanan informasi guna memenuhi kebutuhan informasi yang mampu mendukung terwujudnya masyarakat yang kompetitif, pengembangan teknologi informasi terhadap layanan informasi yang telah terkoordinasi, pengembangan promosi potensi investasi guna mewujudkan masyarakat yang kompetitif serta menarik investasi

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 21/8/25
Access From (repository.uma.ac.id)21/8/25

Menurut Indrajit (2002:5) manfaat yang diperoleh dengan diterapkannya konsep *e-Government* bagi suatu negara, antara lain:

a. Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para *stakeholder*-nya masyarakat, kalangan bisnis, dan industri terutama dalam hal kinerja efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara.
b. Meningkatkan trasnparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah dalam rangka penerapan konsep *Good Governance.*
c. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi,relasi, dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholdernya untuk keperluan aktivitas sehari-hari.
d. Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak berkepentingan.
e. Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan trend yang ada
f. Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis

Sedangkan menurut Tjahjanto dalam Salam (2004:254), manfaat terpenting dari implementasi *e-Government* adalah terwujudnya pemerintahan yang lebih bertanggung jawab bagi warganya. Selain itu, akan lebih banyak masyarakat yang bisa mengakses informasi, pemerintahan juga lebih efisien dan efektif, serta akan tercipta layanan pemerintahan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Diharapkan dengan pemanfaatan yang lebih baik atas sumber daya, proses dan

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 21/8/25
Access From (repository.uma.ac.id)21/8/25

teknologi informasi bisa terjadi pula pemerintahan yang lebih baik. Dalam lampiran Inpres No 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government, dengan mempertimbangkan kondisi saat ini, pencapaian tujuan strategis e-governmet perlu dilaksanakan melalui enam strategi yang berkaitan erat yaitu sebagai berikut:

1. Mengembangkan sistem pelayanan yang handal, terpercaya serta terjangkau masyarakat luas. Sasarannya antara lain, perluasan dan peningkatan kualitas jaringan koomunikasi keseluruh wilayah Negara. Sasaran lain adalah pembentukan portal informasi dan pelayanan public yang dapat mengintegrasikan sistem manajemen dan proses kerja instansi pemerintah.
2. Menata sistem manajemen dan proses kerja pemerintah agar dapat mengadopsi kemajuan teknologi informasi secara cepat.
3. Memanfaatkan teknologi informasi secara optimal. Sasaran yang ingin dicapai adalah standarisasi yang berkaitan dengan interopabilitas pertukaran dan transaksi informasi antar portal pemerintah. Standarisasi dan prosedur yang berkaitan dengan manejeman dokumen dan informasi elektronik.
4. Meningkatkan peran serta dunia usaha dan mengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi informasi. Sasaran yang ingin dicapai adalah adanya partisipasi dunia usaha dalam mempercepat pencapaian tujuan strategis e-government.
5. Mengembangkan kapasitas sumber daya manusia. Baik pemerintah maupun masyarakat

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 21/8/25
Access From (repository.uma.ac.id)21/8/25

6. Melaksanakan pengembangan secara sistematis melalui tahapan yang realistis dan terukur dalam pengembangan e-government, dapat dilaksanakan dengan empat tingkatan, yaitu: persiapan, pematangan, pemantapan dan pemanfaatan.

Pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun (2003) tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Electronic Government, dalam hal ini E-Government diarahkan untuk mencapai 4 tujuan, antara lain;

1. Terwujudnya jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik (website) yang kualitas dan jangkauannya dapat memuaskan masyarakat luas serta dapat diakses di seluruh wilayah, kapan saja, tanpa batasan waktu, dan dengan biaya yang terjangkau masyarakat.
2. Mengembangkan hubungan interaktif dengan dunia usaha (interaksi) dalam rangka mendorong pembangunan perekonomian nasional dan mempercepat kemampuan menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional.
3. Membangun mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga negara (transaksi) dan memfasilitasi dialog publik dengan masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan negara
4. Terwujudnya sistem pengelolaan dan proses kerja yang transparan dan efisien, kemudahan transaksi dan pelayanan antar lembaga pemerintah dan pemerintah daerah otonom (transformasi).

Berdasarkan temuan penelitian Harvard JFK School Government, ada tiga faktor keberhasilan yang harus dimiliki dan ditanggapi dengan serius agar konsep digitalisasi dapat diterapkan di sektor publik. Faktor keberhasilan tersebut adalah: Support, Capacity, dan Value (Indrajit, 2013).

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 21/8/25
Access From (repository.uma.ac.id)21/8/25

1. S*upport* (Dukungan)

Kata *support* berarti dukungan, dan elemen pertama dan terpenting yang harus dimiliki pemerintah adalah dukungan dari berbagai tingkat pejabat publik dan politik dalam rangka menerapkan konsep *E-Government*, bukan sekadar mengikuti tren. Berbagai inisiatif pengembangan dan pengembangan E-Government akan sulit dilaksanakan tanpa adanya unsur "kemauan politik" dari pemerintah. Yang dimaksud dengan dukungan bukan sekedar kata-kata saja, melainkan juga sebagai berikut:

a. Disepakati bahwa kerangka *E-Government* merupakan salah satu kunci keberhasilan negara dalam mewujudkan visi dan misi negara, dan hal tersebut harus diprioritaskan.
b. Konsep *E-Government* disosialisasikan secara luas ke seluruh masyarakat melalui berbagai cara yang positif.

2. Capacity (Sumber Daya)

Komponen kapasitas merupakan komponen kemampuan atau pemberdayaan pemerintah daerah dalam mewujudkan visi EGovernment. Dalam konteks ini, pemerintah harus mempunyai tiga hal dengan unsur-unsur berikut:

a. Sumber daya yang cukup untuk menjalankan berbagai inisiatif EGovernment, terutama melibatkan waktu yang berhubungan dengan keuangan atau finansial.
b. Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang tepat guna, karena fasilitas ini merupakan 50% kunci keberhasilan penerapan E-Government.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 21/8/25
Access From (repository.uma.ac.id)21/8/25

c. Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan dan keahlian yang diperlukan untuk memungkinkan penerapan EGovernment sesuai dengan prinsip manfaat yang diharapkan.

3. *Value* (Manfaat)

Dukungan dan sumber daya merupakan dua aspek pemerintah sebagai penyedia layanan yang disebutkan di atas. Dalam hal ini masyarakat, bukan pemerintah, yang menentukan tingkat keuntungan dari E-Government. Oleh karena itu, pemerintah harus sangat berhatihati dalam menentukan aplikasi E-Government mana yang harus diprioritaskan agar benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.

Rianto, Budi dkk (2012) mengatakan ada 4 indikator keberhasilan E-Government, yaitu;

a. Ketersediaan data dan informasi pada pusat data
b. Ketersediaan data dan informasi untuk kebutuhan promosi daerah Akses terhadap aplikasi *E-Government*
c. untuk membantu pekerjaan kantor dan pelayanan publik.
d. Tersedianya aplikasi dialog publik untuk meningkatkan komunikasi antar pemerintah, antara pemerintah dengan swasta, dan antara pemerintah dengan masyarakat umum melalui email, SMS, dan konferensi jarak jauh (*teleconference)*

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 21/8/25
Access From (repository.uma.ac.id)21/8/25

Adapun beberapa jenis pelayanan E-Government menurut Richardus Eko Indrajit (2016), yakni sebagai berikut:

a. Publikasi (Publish) Jenis Pelayanan ini hanya menyediakan komunikasi satu arah. Sebagaimana disampaikan Richardus Eko Indrajit, komunikasi satu arah terjadi pada bagian penerbitan, dimana masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dapat secara langsung bebas mengakses data dan informasi pemerintah dengan menggunakan internet yang disediakan oleh pemerintah kepada masyarakat.
b. Interaksi (Interact) Jenis pelayanan tingkat interaktif ini memungkinkan pemerintah dan pihak lain berkomunikasi dua arah. Ada dua cara untuk mengimplementasikan layanan interaktif ini: yang pertama dalam bentuk portal, dimana situs terkait menyediakan fungsi pencarian bagi mereka yang mencari data atau informasi tertentu. Kedua, pemerintah menyediakan saluran dimana masyarakat dapat berkomunikasi dengan berbagai pihak yang berkepentingan, baik secara langsung (melalui chatting, teleconference, web-TV, dan sebagainya) maupun secara tidak langsung (melalui email, frequent ask question, newsletter, mailing list dan lain sebagainya).
c. Transaksi (*Transact)* Pelayanan ini selain memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah antara pemerintah dan pihak lain, pelayanan jenis ini juga dapat melakukan transaksi. Lapisan ini melibatkan interaksi dua arah, mirip dengan kelas interaksi, namun ada transaksi yang melibatkan transfer uang dari satu pihak ke pihak lain (tidak gratis; masyarakat harus membayar layanan yang disediakan oleh pemerintah atau mitranya).

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 21/8/25
Access From (repository.uma.ac.id)21/8/25

Terdapat empat model tahapan pengembangan e-Government. Model ini terbagi atas dimensi kompleksitas teknologi dan organisasi dengan tingkat integrasi data dan informasi. Adapun tahapan pengembangan tersebut adalah:

1. Catalouging, memiliki karakteristik berfokus kepada bagaimana pemerintah memberikan informasi dan mempresentasikannya ke dalam website. Biasanya, pemerintah akan memberikan informasi yang terbaru (up to date) kepada masyarakat. Jika perlu, pemerintah akan memberikan file yang dapat diunduh dan digunakan oleh masyarakat.
2. Transaction, memiliki karakteristik bahwa pemerintah terhubung langsung dengan sistem internal pemerintah melalui antar muka dan memberikan jalan bagi masyarakat untuk melakukan pengurusan administrasi kepada pemerintah secara elektronik

Negara-negara maju memandang bahwa implementasi e-Government yang tepat akan secara signifikan memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat disuatu Negara secara khusus, dan masyarakat dunia secara umum. Ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh dengan diterapkannya konsep e- Government bagi suatu Negara, antara lain :

a. Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholdernya (masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal kinerja efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara.
b. Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep *Good Corporate Governance.*

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 21/8/25
Access From (repository.uma.ac.id)21/8/25

2.5 Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan, maka dalam kajian pustaka ini penelitian mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut;

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

NO	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Angga Arista (2010)	Analisis Penerapan system informasi manajemen kepegawaian (SIMPEG) di badan kepegawaian Karang Anyar	Hasil penelitian menunjukkan Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Badan Kepegawaian Daerah Karanganyar didukung oleh komponen-komponen pendukung sistem yang terdiri dari; sumber daya manusia, software, hardware, database, dan jaringan Usaha yang dilakukan untuk mengoptimalkan penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di BKD Karanganyar antara lain komponen sumber daya manusia: mengadakan pelatihan dan workshop berkaitan dengan penerapan sistem informasi manajemen berbasis komputer, menyediakan anggaran tersendiri untuk pengembangan SDM, melakukan penambahan pegawai yang kompeten di bidang komputer; komponen software dengan perawatan software secara

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 21/8/25
Access From (repository.uma.ac.id)21/8/25

			berkala; komponen hardware: upgrade komputer server untuk mempercepat pengolahan data pegawai, perawatan secara berkala terhadap semua hardware
2.	Indra Borman (2012)	Evaluasi penerapan system informasi manajemen kepegawaian (SIMPEG) di badan kepegawaian kabupaten pamekasan	Hasil penelitian disimpulkan bahwa penerapan Sitem Infomrasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pamekasan mempunyai tingkat keberhasilan cukup baik, karena berdasarkan hasil klasifikasi tingakatan skor data kuesioner secara umum SIMPEG sudah baik, faktor-faktor keberhasilan yang ada dalam model HOT-Fit dan hubungan antara komponen manusia, organisasi dan teknologi menunjukkan hasil yang baik, meskipun ada beberapa faktor yang perlu ditingkatkan dalam mewujudkan keberhasilan penerapan sistem informas
3.	Dian Hartanti (2009)	Analisis Sistem informasi kepegawaian pemerintah Jakarta Barat berbasis Web	Dapat disimpulkan bahwa informasi seputar data pribadi mereka juga data lainnya secara cepat, akurat terpercaya kebenarannya. hanya dengan mengakses sistem itu melalui internet dari komputer mereka. Sistem informasi kepegawaian juga sangat membantu Walikota untuk mendapatkan informasi yang diperlukannya sebagai pertimbangan promosi jabatan atau kenaikan pangkat seorang pegawai. Dengan adanya menu perekaman pegawai, seorang database

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 21/8/25

Access From (repository.uma.ac.id)21/8/25

			administrator dapat lebih mudah meng-*input* dan meng-*update* data baru pegawai.
4.	Romi Rahmadi (2008)	Analisis Kebijakan penerapan E-Government melalui system informasi manajemen kepegawaian (SIMPEG) di Jawa Barat	Hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat khususnya Biro Kepegawaian Sub Bagian Data dan Informasi Kepegawaian memberikan ketegasan dengan membuat peraturan yang khusus dan secara teknis mengatur dan mengelola SIMPEG, agar dalam pengelolaan data kepegawaian melalui SIMPEG tersebut menghasilkan data yang valid dan berkualitas.
5.	Jaka Nugraha (2007)	Implementasi kebijakan system informasi manajemen kepegawaian dalam menunjang pelayanan kepengawasan pada Dinas Sumber daya Air Jawa Barat	Hasil penilitian menunjang pelayanan Kepegawaian pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat, secara keseluruhan berdasarkan dimensi komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana disposisi struktur birokrasi menunjukan belum profesional dalam bidang IT serta belum memadainya anggaran biaya

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 21/8/25

Access From (repository.uma.ac.id)21/8/25

2.6 Kerangka Pemikiran

Sistem penalaran merupakan nalar pemikiran penelitian yang disusun berdasarkan realitas, persepsi, dan tulisan penelitian. Motivasi di balik struktur penalaran adalah untuk membentuk cara pemeriksaan yang masuk akal dan masuk akal untuk mendobrak eksplorasi yang diarahkan (Sugiono, 2013: 88). Kerangka berpikir dalam ilmu administrasi Publik mengacu pada kaitan yang logis memastikan adanya hubungan antara variable, dalam penelitian ini penulis meneliti mengenai "Analisis Implementasi Sistem Informasi Manajemen Aparatur Sipil Negara (SIMASGARA) Pada Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mandailing Natal".

Dalam menjawab rumusan masalah penelitian maka penulis menggunakan Praturan Bupati Mandailing Natal No. 49 tahun 2022 tentang ketentuan umum pasal 1 ayat 13 menyatakan sistem informasi manajemen Aparatur Sipil Negara (SIMASGARA) adalah aplikasi yang berbasis Web dibidang kepegawaian yang di bangun untuk menyederhanakan pelayanan kepegawaian meliputi; modul referensi kepegawaian, modul biodata pegawai, modul perencanaan formasi, modul riwayat pegawai, modul perhitungan gaji pegawai, modul penilaian angka kredit, modul mutase pegawai, modul transfer data, modul fasilitas laporan.

Dalam menganalisis penelitian sistem informasi manajemen Aparatur Sipil Negara (SIMASGARA) pada Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mandailing Natal penulis menggunakan indikator Teori Menurut George C. Edwards III (1974) Meliputi: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Setelah itu dapat menganalisis faktor apa yang menjadi penghambat dalam penerapan sistem informasi manajemen Aparatur

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 21/8/25
Access From (repository.uma.ac.id)21/8/25

Sipil Negara (SIMASGARA) pada badan kepegawaian pengembangan sumber daya manusia Kabupaten Mandailing Natal. Uraian Kerangka pemikiran diatas dapat dilihat dari gambar berikut :

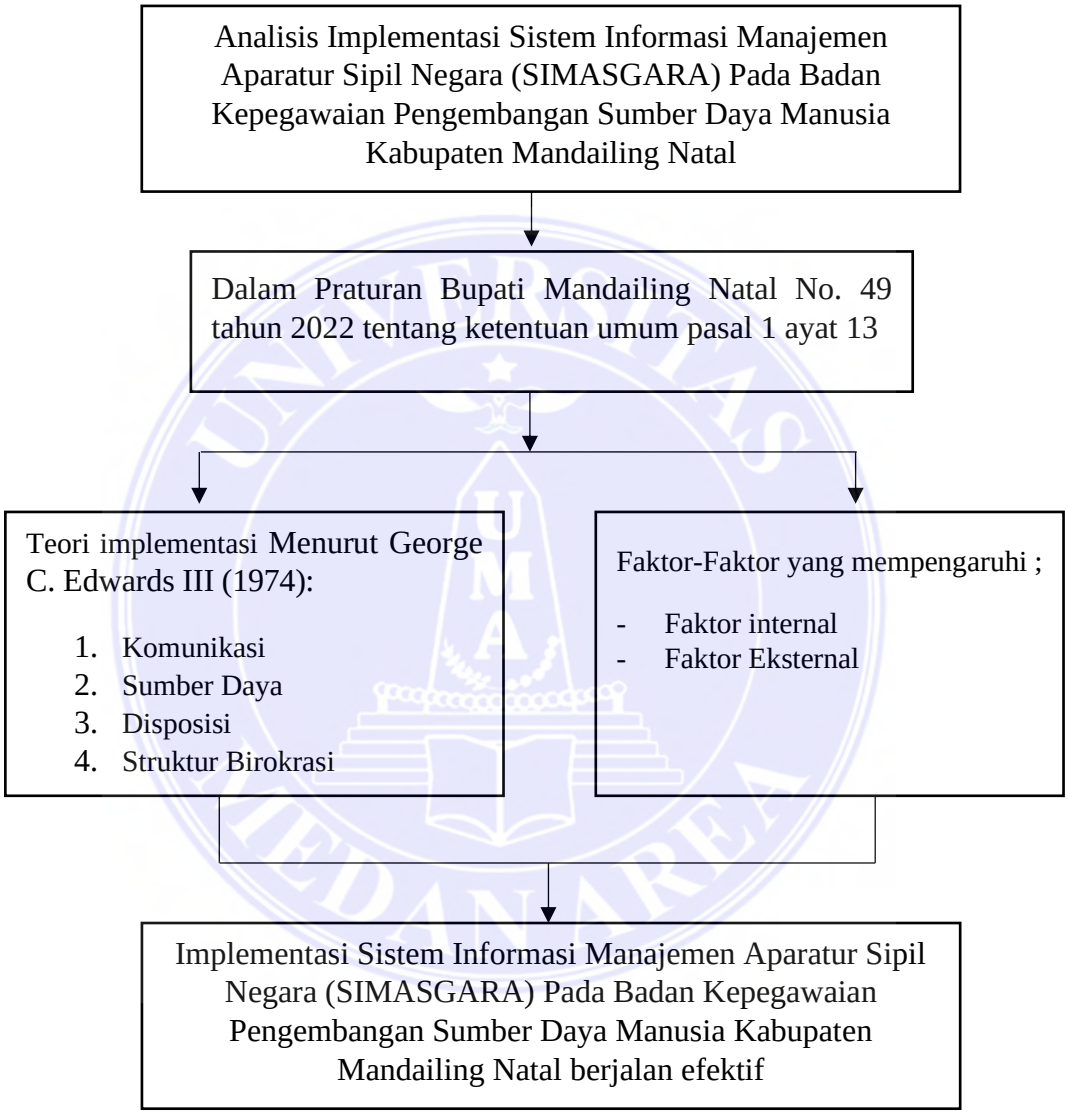

Gambar 2. 1. Kerangka Pemikiran

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 21/8/25
Access From (repository.uma.ac.id)21/8/25

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya prilaku,persepsi,motivasi, tindakan dan lain sebagainya secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus alamiah dan dengan memanfaatkan metode alamiah (Moleong, 2016:6)

Adapun deskriptif menurut Sugiyono (2014:11) adalah penelitian yang digunakan untuk mengetahui nilai variabel/mandiri, baik satu variable atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lain. Tujuan dari penelitian Deskriptif ini adalah membuat deskripsi gambaran secara sistematis actual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifar serta hubungan antara fenomena yang dimiliki.

Pada penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dimana pemecahan masalah yang diselidiki menggambarkan keadaan objek penelitian, berdasarkan fakta yang terlihat dilapangan. Pada penelitian ini, peneliti ingin mengetahui Bagaimana Analisis Implementasi Sistem Informasi Manajemen Aparatur Sipil Negara (SIMASGARA) Pada Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mandailin Natal dan faktor penghambat Implementasi Sistem Informasi Manajemen Aparatur Sipil Negara (SIMASGARA) Pada Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mandailin Natal.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 21/8/25
Access From (repository.uma.ac.id)21/8/25

dengan mendasarkan pada hasil observasi, wawancara, dokumentasi, dan hasil studi kepustakaan.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan, yang menjadi tempat lokasi penelitian penulis di Kantor Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mandailing Natal terletak di Jl. Parbangunan, Kec. Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara 22952. Alasan penulis memilih lokasi ini karena penulis terfokus pada Sistem Informasi Manajemen Aparatur Sipil Negara (SIMASGARA) yang masih terdapat beberapa kekurangan yang harus dibenahi dari persoalan teknis dan persoalan lainnya agar sistem informasi manajemen kepegawaian yang diinginkan dapat terwujud dengan semestinya, Adapun tahap perincian kegiatan yang akan dilakukan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1. Waktu Penelitian

No	Uraian Kegiatan	Tahun 2024					Tahun 2025		
		Juni	Juli	Agus	Sep	Okt-Des	Jan	Feb	Mar
1	Penyusunan Proposal								
2	Seminar Proposal								
3	Penelitian								
4	Penyusunan Tesis								
5	Seminar Hasil								
6	Bimbingan Tesis								
7	Sidang Tesis								

Sumber; Peneliti,2024

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 21/8/25
Access From (repository.uma.ac.id)21/8/25

3.3 Sumber Data

Dalam Penelitian ini sumber data yang digunakan terbagi atas data primer dan data sekunder penjelasannya sebagai berikut :

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya Subjek penelitian yang didapat dari melakukan observasi dan wawancara pada subjek penelitian. Pada penelitian ini Observasi dilakukan untuk mengetahui bagaimana analisis implementasi sistem informasi manajemen Aparatur Sipil Negara (SIMASGARA) Pada Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mandailin Natal. dengan melakukan wawancara pada informan yaitu Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mandailin Natal, Kemudian ada Kepala Bidang Pengembangan Mutasi dan Promosi Lalu Kabid Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian, Kasubbag Program dan Keuangan Daerah Serta Analisis SDM Aparatur. yang memiliki kompetensi dan juga integritas dalam memberikan jawaban terhadap beberapa pertanyaan yang diajukan oleh peneliti melalui kuisioner.
2. Data skunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung atau melalui media perantara. Pada penelitian ini Data skunder yang diperoleh seperti dokumen resmi, data statistic, catatan-catatan tertulis, laporan-laporan, maupun arsip-arsip resmi yang ada di Kantor Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mandailing Natal.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 21/8/25
Access From (repository.uma.ac.id)21/8/25

3.4 Informan Penelitian

Informan merupakan salah satu anggota kelompok partisipan yang berperan sebagai pengarah dan penerjemah muatan budaya atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Informan penelitian ini dipilih karena paling banyak mengetahui atau terlibat langsung (Sugiyono, 2016: 300)

Menurut Suyatno (dalam Nila 2015:42) bahwa informan penelitian meliputi beberapa jenis, yaitu :

1. Informan kunci adalah mereka yang mengetahui dan memiliki banyak latar belakang informasi yang dibutuhkan untuk penelitian. Adapun informan kunci dalam penelitian ini adalah Bapak Drs. Lismulyadi Nasution, MM. Selaku Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mandailin Natal.
2. Informan utama adalah mereka yang secara langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti. Adapun informan utama dalam penelitian ini adalah Bapak Kirsa Ahmad, SE. Selaku Kepala Bidang Pengembangan Mutasi dan Promosi Daerah Kabupaten Mandailing Natal Serta Bapak Perlindungan, ST. Selaku Kabid Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian Pada BKPSDM Kabupaten Mandailing Natal.
3. Informan tambahan adalah mereka yang dapat memberikan informasi meskipun tidak terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Adapun yang menjadi informan tambahan dalam penelitian ini adalah Ibuk Siti Khadijah Harahap. M. Pd. Selaku Kasubbag Program dan Keuangan Daerah Kabupaten Mandailing Natal dan Bapak Saifullah, ST Selaku Analisis SDM Aparatur.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 21/8/25
Access From (repository.uma.ac.id)21/8/25

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data yang dibutuhkan untuk penelitian ini maka dilakukan pengumpulan data meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi berikut penjelasanya ;

1. Observasi

Menurut Sugiyono (2018:229) observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Observasi juga tidak terbatas pada orang, tetapi juga Objek-objek alam yang lain. Melalui kegiatan observasi peneliti dapat belajar tentang prilaku dan makna dari prilaku tersebut.

Pada penelitian ini Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung serta teknik pengumpulan data dengan observasi lebih efektif menggunakan cara mengamati dan membaur di lokasi penelitian untuk memperoleh gambaran kenyataan tentang sistem informasi manajemen Aparatur Sipil Negara (SIMASGARA) yang selama ini dilakukan serta mencataat langsung yang berkaitan dengan objek yang diteliti.Kegiatan observasi ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana Analisis Implementasi Sistem Informasi Manajemen Aparatur Sipil Negara (SIMASGARA) Pada Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mandailing Natal.

2. Wawancara

Dalam metode penelitian kualitatif, wawancara menjadi metode pengumpulan data yang utama. Esteberg dalam (Sugiyono, 2015:317). Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab sehingga dapat di konstruksikan makna dalam topic tertentu.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 21/8/25
Access From (repository.uma.ac.id)21/8/25

Pada penelitian ini wawancara yang digunakan yaitu wawancara terstruktur, berupa pertanyaan menggunakan kuisioner yang diajukan kepada informan yang berkenan dalam menjawab setiap poin pertanyakan yang diajukan. Hasil wawancara digunakan peneliti sebagai sumber data utama dalam penelitian ini.

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2017:58) dokumen merupakan catatan pristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, dan karya-karya monumental dari seseorang. Hasil akan wawancara akan lebih baik apabila didukung oleh dokumen, dan menambah informasi untuk penelitian.

Pada penelitian ini dokumentasi yang digunakan peneliti berupa beberapa pengambilan foto-foto ataupun gambar yang jelas untuk pendukung dalam penelitian.

3.6 Analisis Data

Analisi data menurut Sugiyono (2018: 482) merupakan suatu proses untuk mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Sedangkan menurut Moleong (2017: 280-281) Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, katagori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Tujuan metode deskriptif adalah

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 21/8/25
Access From (repository.uma.ac.id)21/8/25

untuk memberikan gambaran secara sistematis, aktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diteliti.

a. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Menurut (Sugiyono, 2018: 322) pengumpulan data merupakan tahapan untuk menerima data dan informasi. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

Pada penelitian ini peneliti melakukan Pengumpulan secara berhari-hari sehingga data yang diperoleh akan didapat lebih banyak. data tersebut berbentuk tulisan, rekaman. Yang dikumpulkan kemudian diperoses. Pada tahap ini peneliti melakukan penelitian secara umum terhadap situasi sosial/ objek yang diteliti, dan semua yang penulis lihat dan didengar akan direkam. Dengan demikian peneliti memperoleh data dari berbagai sumber. Dengan merencanakan dan mempersiapkan metode atau prosedur agar data yang kita inginkan dapat terkumpul secara lengkap dari lapangan.

b. Reduksi Data (*Data Reduction)*

Menurut Sugiyono (2016: 247), reduksi data adalah merangkum, memilih, hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema data polanya. Dengan kata lain, peneliti merangkum kembali data-data untuk memilih dan memfokuskan pada bagian yang penting dan memberikan gambaran yang jelas mengenai hubungan jarak jauh dengan menggunakan video call sebagai media komunikasi.

Pada penelitian ini Peneliti mereduksi data dengan cara membuat rangkuman, dengan memilih hal-hal pokok, dan memfokuskan pada hal-hal penting, mencari tema dan pola, serta membuang hal-hal yang dianggap tidak

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 21/8/25
Access From (repository.uma.ac.id)21/8/25

penting. Dengan demikian peneliti lebih mudah memberikan gambaran yang lebih spesifik dan mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data tentang Analisis Implementasi Sistem Informasi Manajemen Aparatur Sipil Negara (SIMASGARA) Pada Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mandailing Natal.

c. Penyajian Data (*Data Presentation*)

Menurut Sugiyono (2016: 249). Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan hubungan antar katagori maupun sejenisnya. yang paling penting digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif yaitu dengan teks yang bersifat naratif. Penyajian data dilakukan agar peneliti lebih mudah dan memahami data dengan baik.

Pada Penelitian ini peneliti di tahap penyajian data, berusaha menyusun data yang relavan untuk menghasilkan informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu, peneliti melakukan dengan cara menampilkan dan membuat hubungan antar fenomena untuk memaknai apa yang sebenarnya terjadi di Kantor Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mandailing Natal.dan apa yang ditindak lanjuti untuk mencapai tujuan penelitian tentang Analisis Implementasi Sistem Informasi Manajemen Aparatur Sipil Negara (SIMASGARA) Pada Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mandailing Natal.

d. Kesimpulan / Verifikasi

Menurut Sugiyono (2016:17), Kesimpulan adalah langkah terakhir dari suatu periode penelitian yang berupa jawaban masalah pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan atas data-data yang telah diperoleh dari hasil

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 21/8/25
Access From (repository.uma.ac.id)21/8/25

wawancara dan observasi sehingga menjadi penelitian yang data menjawab permasalahan yang ada.

Pada penelitian ini Peneliti akan menarik kesimpulan atau verifikasi data dengan mengambil intisari dari analisis yang dilakukan dalam penelitian di Kantor Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mandailing Natal, Peneliti akan mendapatkan bukti-bukti yang disebut verifikasi data. Dengan Apa yang kita teliti akan di verifikasi dengan temuan-temuan data dan akhirnya peneliti sampai pada penarikan kesimpulan akhir yang merupakan bagian dari penelitian dalam menganalisis suatu masalah yang lebih spesifik dan tepat dengan teori-teori yang sesuai.

3.7 Definisi Konsep dan Definisi Operasional

3.7.1 Definisi Konsep

Konsep dalam suatu penelitian merupakan uraian sistematis tentang teori bukan sekedar pendapat pakar atau penulis buku dan hasil-hasil penelitian yang relavan dengan indicator yang diteliti.

Definisi konsep dalam penelitian ini adalah :

a. Implementasi Menurut teori Mulyadi, (2015;12) merupakan mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan
b. Implementasi Menurut Teori Dwiyanto (2017:143) juga menjelaskan bahwa implementasi ini menunjuk aktivitas menjalankan program dalam ranah senyatanya, baik yang dilakukan oleh organ pemerintah maupun para pihak

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 21/8/25
Access From (repository.uma.ac.id)21/8/25

yang telah ditentukan dalam program implementsi sendiri biasanya ada yang disebut sebagai pihak implementor dan kelompok sasaran.

3.7.2 Definisi Operasional

Implementasi dijelaskan Menurut teori *George C. Edwards III* (1974) merupakan sumber yang penting meliputi, staff yang memadai serta keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik. Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak faktor atau varible yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, Dalam teori ini dapat dilihat dari beberapa faktor yang menjadi indikator implementasi dalam kebijakan pemerintah sebagai berikut :

a. Komunikasi merupakan suatu proses dalam suatu organisasi yang kompleks dan rumit. seseorang bisa meyebarluaskannya untuk kepentingan tertentu. di samping itu sumber informasi yang berbeda juga akan melahirkan interpretasi yang berbeda , Agar implementasi dapat berjalan secara efektif siapa yang bertanggung jawab dalam mengambil keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat malakukannya. Sesungguhnya implementasi kebijakan harus diterima oleh semua personel dan harus mengerti secara jelas dan akurat mengenahi maksud dan tujuan kebijakan.
b. Sumber Daya merupakan kebijakan program dan akuratnya komunikasi yang dikirim Jika personel yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program kekurangan sumber daya dalam melakukan tugasnya. Komponen tersebut meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 21/8/25
Access From (repository.uma.ac.id)21/8/25

sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin program dapat diarahkan kepada yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dipakai seperti dana dan sarana prasarana untuk kelancaran kegiatan program.

c. Sikap atau Disposisi merupakan faktor yang mempengaruhi kebijakan, Jika implementor setuju dengan bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi apabila berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implemnetasi akan menjadi banyak masalah. Ada tiga bentuk sikap/respon implementor terhadap kebijakan yaitu kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut.

d. Struktur Biokrasi merupakan karakteristik, pola, norma serta hubungan yang terjadi secara berulang dalam badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Implementasi akan gagal apabila struktur birokrasi yang ada menghalangi koordinasi dan apabila sumber daya cukup untuk melaksanakan suatu kebijakan dan para implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan..

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 21/8/25
Access From (repository.uma.ac.id)21/8/25

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas Mengenai Implementasi sistem informasi manajaemen Aparatur Sipil Negara (SIMASGARA) pada Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mandailing Natal. Maka dapat ditarik kesimpulan antara lain;

1. Analisis implementasi sistem informasi manajaemen Aparatur Sipil Negara (SIMASGARA) pada Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mandailing Natal. Dilihat dari beberapa indikator yang meliputi ;
   a) Komunikasi dari indikator ini menunjukkan bahwa dalam menggunakan aplikasi berbasis web SIMASGARA memberikan dampak yang baik, efektif, cepat, akurat dalam mendukung administrasi kepegawaian dan pengambilan keputusan manajemen kepegawaian di lingkungan pemerintahan Daerah.
   b) Sumber Daya dari indikator ini menunjukkan bahwa adanya program aplikasi SIMASGARA ini dapat digunakan dalam Absensi online, update pelayanan absen wajah, rekap absen perminggu, pengusulan KGB, pengusulan CUTI, SKP online dan penghitungan TPP dan dengan adanya aplikasi SIMASGARA berbasis web ini, membuat kinerja semakin efektif dan efisien didalam lingkungan pemerintah Kabupaten Mandailing Natal.

Document Accepted 21/8/25
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)21/8/25

c) Sikap atau Disposisi dari indikator ini menunjukkan bahwa sistem informasi manajemen Aparatur Sipil Negara SIMASGARA ini sangat berpengaruh bagi pegawai untuk mempercepat sistem pekerjaan yang mereka laksanakan seperti dapat merekapitulasi pegawai secara otomatis, kemudian dapat mempermudah pekerjaan dalam perhitungan gaji para pegawai, dan dapat lebih cepat dalam melakukan penilaian angka kredit para pegawai.

d) Struktur Biokrasi dari indikator ini menunjukkan bahwa aplikasi SIMASGARA yang digunakan saat ini sangat membantu dan mempermudah pekerjaan para pegawai dalam lingkungan pemerintahan di Kabupaten Mandailing Natal seperti dalam koordinasi antar setiap instansi dari layanan yang ada, dapat memberikan data mengenai nama jabatan yang kosong di setiap OPD kemudian dapat mentrasfer data-data penting antar instansi secara online, lalu dapat mengirim laporan hasil pekerjaan secara cepat tanpa perlu khawatir adanya data-data laporan yang tercecer.

2. Adapun faktor Penghambat implementasi sistem informasi manajaemen Aparatur Sipil Negara (SIMASGARA) pada Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mandailing Natal yaitu para ASN masih ada yang tidak memiliki HP, dan untuk melakukan absensi secara online kurangnya jaringan internet dalam daerah terpencil, kemudian aplikasi sering eror mengakibatkan pegawai tidak bisa presensi dan para ASN tidak adanya kesadaran dalam mengupdate data.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 21/8/25
Access From (repository.uma.ac.id)21/8/25

5.2 Saran

Sebagai upaya memberikan masukan dalam rangka mengoptimalkan implementasi sistem informasi manajaemen Aparatur Sipil Negara 9SIMASGARA) pada Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mandailing Natal, Maka berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlunya tambahan anggaran untuk aplikasi SIMASGARA agar dapat memilih layanan internet yang cepat sehingga Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian mendukung dalam pelayanan kepegawaian baik untuk di Daerah terpencil
2. Perlunya dilakukan secara jelas dalam sosialisasi tentang pengelolaan data dan informasi kepada setiap unit kerja di lingkungan Pemerintah dan penambahan sumber daya manusia dalam hal petugas pengelola sistem menjaga kualitas informasi yang disajikan

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 21/8/25
Access From (repository.uma.ac.id)21/8/25

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi. 2010, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: PT. Rineka Cipta

Bahfiarti, Tuti 2012, Buku Ajar Dasar-Dasar Teori Komunikasi. Universitas Hasanuddin, Makassar

Bulaeng, A.R. 2000. Metode Penelitian Komunikasi Kontemporer. Universitas Hasanuddin Press, Makassar.

Cangara, Hafied 2014. Pengantar Ilmu Komunikasi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,

Cangara, Hafied 2014. Perencanaan & Strategi Komunikasi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Darmawan, Deni. 2012. Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Faisal, Sanapiah. 1990. Penelitian Kualitatif (dasar-dasar dan aplikasi). Malang: Ya3

Malang Fathoni, Abdurrahmat. 2006. Organisasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT. Rineke Cipta

Hadi Sutrisno. (2002). Metodologi Riset. Yogyakarta: Andi Ofset

Hardiman, F. Budi. (2010). Ruang Publik: Melacak Partisipasi Demokratis dari Polis sampai Cyberspace. Yogyakarta: Kanisius

Indrajit. R.E 2006. Konsep Pelayanan Publik Berbasis Internet dan Teknologi Informasi. Jakarta: Aptikom

Kadir. A dan Triwahyuni. T, 2003. Pengenalan Teknologi Informasi. Yogyakarta: Andi

Lexy J. Moleong, 2016, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung : Afiabeta

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 21/8/25
Access From (repository.uma.ac.id)21/8/25

Littlejohn & Foss A. K, 2011. Teori Komunikasi, *Theories of Human Communication*. Edisi 9. Jakarta: Salemba Humanika

McKee, Alan. (2005). *An Introduction to The Public Sphere*. Cambridge: Cambridge University Press.

McQuail & Denis, 2011. Teori Komunikasi Massa Mcquail, Edisi 6 Buku1. Jakarta: Salemba Humatika

Soerjono, Soekanto, 2009, *teori Peran* , Jakarta : Bumi Aksara

Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif R&B,* Bandung :Afiabeta

_____, 2015, *Metode Penelitian Administrasi,* Bandung : Afiabeta

_____, 2017, *Dokumentasi Dalam Skripsi,* Bandung : Afiabeta

_____, 2018, *Memahami Penelitian Kualitatif,* Bandung : Afiabeta

UNDANG- UNDANG

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.

Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 49 Tahun 2022 tentang ketentuan umum pasal 1 ayat 13 bahwa sistem manajemen aparatur sipil negara (SIMASGARA)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 21/8/25

Access From (repository.uma.ac.id)21/8/25

Lampiran I

Daftar Wawancara Penelitian

ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA(SIMASGARA) PADA BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANAGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN MANDAILING NATAL

Nama : Drs. Lismulyadi Nasution, MM

Jenis Kelamin : Kepala BKPSDM Kabupaten Mandailin Natal

Pekerjaan : PNS

1. Pedoman Wawancara Kepada Informan Kunci

A. Komunikasi

a. Apakah SIMASGARA ini telah diketahui oleh semua para ASN yang ada di lingkungan Kabupaten Mandailing Natal ?
b. Bagaimana proses kerja SIMASGARA ini ?
c. Apakah dengan adanya SIMASGARA ini dapat mempermudah komunikasi dengan para aparatur sipil negara baik dari segi pelayanan mutasi maupun bidang kenaikan pengkat ?

B. Sumber Daya

a. Apasaja pelayanan yang diberikan dari aplikasi SIMASGARA ini ?
b. Apakah aplikasi SIMASGARA ini sudah memiliki infrastruktur dan sistem keamanan yang baik ?
c. Seberapa besar anggaran yang dialokasikan untuk operasional SIMASGARA ini ?
d. Apakah dengan adanya SIMASGARA ini dapat meningkatkan kinerja di BKPSDM Kabupaten Mandailing Natal ?

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 21/8/25
Access From (repository.uma.ac.id)21/8/25

C. Disposisi

a. Apakah dengan adanya SIMASGARA ini perhitungan gaji pegawai dapat memudahkan dalam mengupdate perhitungan penggajian para pegawai di Kantor Badan kepegawaian pengembangan sumber daya manusia Kabupaten Mandailing Natal ?
b. Apakah modul perhitungan gaji pegawai ini dapat mengurangi perhitungan potongan gaji yang diterima para pegawai?
c. Apakah SIMASGARA ini dapat mempercepat proses kerja BKPSDM atau sama saja seperti layanan konvensional ?

D. Struktur Biokrasi

a. Apakah dengan adanya SIMASGARA ini mempermudah koordinasi antar setiap instansi baik dari layanan mutasi maupun kenaikan kepangkatan?
b. Apakah modul transfer data juga dapat mengekspor data dari setiap PT yang diperlukan?
c. Apakah SIMASGARA ini mempermudah laporan kerja di instansi BKPSDM Kabupaten Mandailing Natal ?

2. Pedoman Wawancara Kepada Informan Utama dan Tambahan

A. Komunikasi

a. Apakah SIMASGARA ini telah diketahui oleh semua para ASN yang ada di lingkungan Kabupaten Mandailing Natal ?
b. Bagaimanakah pemahaman para ASN di Kabupaten Mandailing Natal dengan penggunaan SIMASGARA ini ?
c. Apakah dengan adanya SIMASGARA ini dapat mempermudah komunikasi dengan para aparatur sipil negara baik dari segi pelayanan mutasi maupun bidang kenaikan pengkat ?

B. Sumber Daya

a. Apasaja pelayanan yang diberikan dari aplikasi SIMASGARA ini ?
b. Apakah aplikasi SIMASGARA ini sudah memiliki infrastruktur dapat menjamin keamanan data pegawai ?

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 21/8/25
Access From (repository.uma.ac.id)21/8/25

c. Apakah dengan adanya SIMASGARA ini dapat meningkatkan kinerja di BKPSDM Kabupaten Mandailing Natal ?

C. Disposisi

a. Apakah dengan adanya SIMASGARA ini perhitungan gaji pegawai dapat memudahkan dalam mengupdate perhitungan penggajian para pegawai di Kantor Badan kepegawaian pengembangan sumber daya manusia Kabupaten Mandailing Natal ?
b. Apakah SIMASGARA ini dapat mempercepat proses kerja BKPSDM atau sama saja seperti layanan konvensional ?
c. Berapa jumlah SDM yang mengoperasionalkan SIMASGARA ini dan apakah sudah memiliki kemampuan yang baik ?

D. Struktur Birokrasi

a. Apakah dengan adanya SIMASGARA ini mempermudah koordinasi antar setiap instansi baik dari layanan mutasi maupun kenaikan kepangkatan?
b. Apakah modul transfer data juga dapat mengekspor data dari setiap PT yang diperlukan?
c. Apakah SIMASGARA ini mempermudah laporan kerja di instansi BKPSDM Kabupaten Mandailing Natal ?

3. Faktor Penghambat Sistem Informasi Manajemen (SIMASGARA) Pada Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mandailing Natal

a. Apasaja hambatan implementasi sistem informasi manajemen (SIMASGARA) pada Badan kepegawaian pengembangan sumber daya manusia di Kabupaten Mandailing Natal ?
b. Bagaimana strategi yang dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat implementasi sistem informasi manajemen (SIMASGARA) pada Badan kepegawaian pengembangan sumber daya manusia di Kabupaten Mandailing Natal ?

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 21/8/25
Access From (repository.uma.ac.id)21/8/25

Lampiran II

Surat Izin Turun Lapangan

UNIVERSITAS MEDAN AREA
PASCASARJANA
Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79B/Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 42402994 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id | www.pasca.uma.ac.id *E-Mail:* univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 1039/PPS-UMA/WDI/01/VII/2024 01 Juli 2024
Lampiran : -
H a l : **Surat Ijin Penelitian MAP**

Yth. **Kepala Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mandailing Natal**
di -
Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan adanya tugas akhir bagi mahasiswa Pascasarjana Universitas Medan Area Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu memberikan izin rekomendasi penelitian / observasi lapangan kepada mahasiswa tersebut namanya dibawah ini:

N a m a	:	**Husni Tamrin**
N P M	:	**231801064**
Program Studi	:	**Ilmu Administrasi Publik**
Judul Tesis	:	**Analisis Implemetasi Sitem Informasi Manajemen Aparatur Sipil Negara (Simasgara) Pada Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabuapeten Mandailing Natal**

Untuk melaksanakan pengambilan data di Kantor **Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mandailing Natal** sebagai bahan melengkapi tugas dalam Penulisan Tesis diProgram Studi Magister Ilmu Publik Universitas Medan Area.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n. Bid. Penjaminan Mutu Akademik

Dr. Beby Masitho Batubara, S.Sos, M.AP

CC. File

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 21/8/25
Access From (repository.uma.ac.id)21/8/25

Lampiran III

Surat keterangan Instansi Pengambilan Data Dan Wawancara

PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Komplek Perkantoran Payaloting, Panyabungan, Sumatera Utara Kode Pos 22978
Telp. (0636) 326255, 326258, Faksimile (0636) 326254
Pos-el : info@madina.go.id Laman : www.madina.go.id

Panyabungan, 01 Agustus 2024

Nomor : 800/1093 /BKPSDM/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : –
Hal : Pengambilan Data dan Wawancara
a.n Husni Tamrin / NPM. 231801064

Kepada :
Yth. Ibu Wakil Ketua Penjaminan Mutu Akademik
Program Pascasarjana Universitas Medan Area
Program Studi Magister Administrasi Publik
di-
Tempat

Sesuai dengan Surat Wakil Bidang Penjamin Mutu Akademik Pascasarjana Universitas Medan Area Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik Nomor : 1039/PPS-UMA/WDI/01/VII/2024 Tanggal 01 Juli 2024 Perihal Surat Ijin Penelitian MAP atas nama :

Nama	: Husni Tamrin
NPM.	: 231801064
Program Studi	: Ilmu Administrasi Publik
Judul Tesis	: Analisis Implementasi Sistem Informasi Manajemen Aparatur Sipil Negara (Simasgara) pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mandailing Natal

Berkenaan dengan hal tersebut di atas kami sampaikan bahwa nama tersebut telah selesai melakukan pengambilan data dan wawancara sesuai dengan judul tesis di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mandailing Natal.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan diucapkan terimakasih.

Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,

Drs. LISMULYADI NASUTION, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19671126 198903 1 002

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 21/8/25

Access From (repository.uma.ac.id)21/8/25

Lampiran IV

Dokumentasi Penelitian

Gambar 5.1 Foto Bersama Bapak Drs. LISMULYADI NASUTION, MM selaku Informan Utama (Wawancara Tanggal 16 September 2024)
(Sumber Dokumentasi Pribadi 2024)

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 21/8/25
Access From (repository.uma.ac.id)21/8/25

Gambar 5.2 Foto Bersama Bapak Kirsa Ahmad, SE selaku informan Utama
(Wawancara Tanggal 17 September 2024)
(Sumber Dokumentasi pribadi 2024)

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 21/8/25
Access From (repository.uma.ac.id)21/8/25

Gambar 5.3 Foto Bersama Ibu Siti Khadijah Harahap, M.Pd
Selaku informan Tambahan (Wawancara Tanggal 18 September 2024)
(Sumber Dokumentasi Pribadi 2024)

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 21/8/25
Access From (repository.uma.ac.id)21/8/25

Gambar 5.3 Foto Bersama Bapak Saifullah, ST
Selaku informan Tambahan (Wawancara Tanggal 18 September 2024)
(Sumber Dokumentasi Pribadi 2024)

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 21/8/25
Access From (repository.uma.ac.id)21/8/25